

**KONSTELASI POLITIK PALESTINA DI TIMUR TENGAH
PASCA NORMALISASI DIPLOMATIK UEA, BAHRAIN DAN
ISRAEL**



SKRIPSI

**Diajukan untuk melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar
sarjana sosial (S.Sos) pada Program studi Politik Islam**

Oleh :

Aidil Saputra

NIM :

1820404022

**PROGRAM STUDI POLITIK ISLAM
FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH
PALEMBANG 1443 H/2022**

SKRIPSI

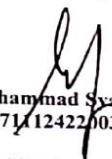
**Konstelasi Politik Palestina di Timur Tengah Pasca normalisasi Diplomatik Uni
Emirat Arab, Bahrain dan Israel**
Yang telah disusun dan dipersiapkan oleh

AIDIL SAPUTRA
NIM. 1820404022


Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada tanggal, 30 November 2022

Susunan Dewan Pembimbing dan Penguji


Ketua Dewan Penguji


Dr. Mohammad Syawaludin, M.Ag
NIP. 197111242203121001


Pembimbing I


Dr. Andi Candra Java, M.Hum
NIP. 197201192007011011


Pembimbing II


Kiki Mikail, M.A
NIP. 198409212019031004

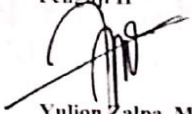
Sekretaris


Yulion Zalpa, M.A
NIP. 1988007072019031011

Penguji I

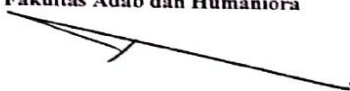

Dr. Mohammad Syawaludin, M.Ag
NIP. 1971112422003121001

Penguji II

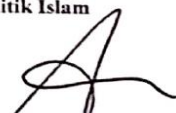

Yulion Zalpa, M.A
NIP. 1988007072019031011

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
Tanggal, 05 Desember 2022

**Dekan
Fakultas Adab dan Humaniora**


Dr. Endang Rochmiatun, M.Hum
NIP. 19710727 199703 2 005

**Ketua Program Studi
Politik Islam**


Dr. Ahmad Svukri, S.IP, M.Si
NIP. 197705252005011014

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku pembimbing skripsi :

1. Dr Andi Candra Jaya, M. Hum
NIP. 197201192007011011
2. Kiki Mikail, MA
NIP. 198409212019031004

Dengan ini menyetujui bahwa skripsi yang berjudul "**KONSTELASI POLITIK PALESTINA DI TIMUR TENGAH PASCA NORMALISASI DIPLOMATIK UNI EMIRAT ARAB, BAHRAIN DAN ISRAEL**" yang di tulis oleh :

Nama : Aidil Saputra
NIM : 1820404022
Program Studi : Politik Islam

Telah di periksa dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqosyah.

Palembang

Pembimbing I



Dr Andi Candra Jaya, M. Hum

NIP. 197201192007011011

Pembimbing II



Kiki Mikail, MA

NIP. 1984092120190310

NOTA DINAS MUNAQSAH

Perihal : Dalam mengikuti ujian Munaqasah jurusan politik Islam

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Raden Fatah Palembang

Di –

Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah skripsi yang berjudul :

“Konstelasi Politik Palestina di Timur Tengah Pasca Normalisasi Diplomatik UEA Bahrain dan Israel”

Yang ditulis oleh :

Nama : Aidil Saputra

NIM : 1820404022

Jurusan : Politik Islam

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan ke Fakultas Adab dan Humaniora UIN Raden Fatah Palembang untuk diujikan dalam rangka mengikuti Ujian Munaqasah Jurusan Politik Islam.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Palembang, 13 Oktober 2022

Pembimbing I



Dr. Andi Candra Java, M.Hum

NIP. 19720119200701101

NOTA DINAS MUNAQSAH

Perihal : Dalam mengikuti ujian Munaqasah jurusan politik Islam

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Adab dan Humaniora

UIN Raden Fatah Palembang

Di –

Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah skripsi yang berjudul :

“Konstelasi Politik Palestina di Timur Tengah Pasca Normalisasi Diplomatik UEA Bahrain dan Israel”

Yang dituliseleh :

Nama : Aidil Saputra

NIM : 1820404022

Jurusan : Politik Islam

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan ke Fakultas Adab dan Humaniora UIN Raden Fatah Palembang untuk diujikan dalam rangka mengikuti Ujian Munaqasah Jurusan Politik Islam.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Palembang, 09 Oktober 2022

Pembimbing II



Kiki Mikail M.a

NIP.198409212019031004

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Aidil Saputra
Tempat & Tanggal Lahir : Palembang – 09 Januari – 2000
NIM : 1820404022
Program Studi : Politik Islam
Judul Skripsi : Konstelasi Politil Palestina di Timur Tengah Pasca
Normalisasi Diplomatik Uni Emirat Arab Bahrain dan
Israel

Menyatakan dengan Sesungguhnya, Bahwa :

1. Seluruh data, informasi, interpretasi, pembahasan dan kesimpulan yang disajikan dalam skripsi ini kecuali yang disebutkan sumbernya adalah merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan serta pemikiran saya dengan pengarahan pembimbing yang ditetapkan.
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Fakultas Adab dan Humaniora UIN Raden Fatah maupun di Perguruan Tinggi lainnya. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti ketidak benaran dalam pernyataan tersebut di atas, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar akademik yang saya peroleh melalui pengajuan skripsi ini.

Palembang, November 2022

Yang Membuat Pernyataan,


Materai Rp. 10.000,-
NIM. 1820404022

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan Mengucap Syukur Alhamdulillah telah terselesaikan

Penulisan skripsi yang berjudul :

**"Konstelasi Politik Palestina di Timur Tengah Pasca Normalisasi Diplomatik
UniEmirat Arab, Bahrain dan Israel"**

Karya sederhana ini aku persembahkan kepada :

Ibu dan Avah Tercinta

Terimakasih telah senantiasa berkorban tenaga, pikiran bahkan materi selama penulis menjalani studi, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya atas kasih sayang selama ini telah diberikan, serta do'a yang sangat begitu tulus.

Hal itu merupakan karunia terbesar yang diberikan Allah kepada penulis.

Doa karya sederhana ini aku bingkiskan kepada:

Kakak, ayuk dan adiku

Teruntuk kakak ku Heppy Juliansyah dan ayuk ku Bella Ria serta adikku Aria Wijaya karya ini kupersembahkan untuk kalian. Semoga kalian sukses dan selalu hadir dalam proses kehidupanku menuju kesuksesan yang lebih besar

Keluarga Besar Tercinta

Kepada keluarga besarku yang tidak bisaku sebut satu per satu, terima kasih telah memberikan dukungan yang sangat luar kepadaku

HALAMAN MOTTO

"Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai dari suatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain, dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap

(Al-Insyirah, 6-8).

"Ilmu itu diperoleh dari lidah yang gemar bertanya serta akal yang suka berpikir."

(Abdullah bin Abbas)

"Selama kemerdekaan Bangsa Palestina Belum Diserahkan kepada orang-orang Palestina, maka selama itulah Bangsa Indonesia berdiri menentang penjajahan Israel"

(Ir Soekarno)

Kamu tidak bisa kembali dan mengubah masa lalu, maka dari itu tataplah masa depan dan jangan buat kesalahan yang sama dua kali

(Penulis)

Abstrak

Normalisasi yang terjadi antara dua negara arab Teluk yakni Uni Emirat Arab dan Bahrain terhadap Israel memberikan dampak secara langsung terhadap palestina baik dari sisi politik maupun ekonomi Deklarasi yang bernama Abraham Accord tersebut di tengahi oleh Amerika serikat selaku broker perdamaian antara israel dengan negara arab teh itu membawa banyak kepentingan dari berbagai sisi. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dampak yang ditimbulkan dari proses Normalisasi tersebut baik bagi palestina maupun israel dari kaca mata Geopolitik Di sisi lain tulisan ini juga ingin mengetahui apa saja kepentingan Uea, Bahrain dan kepentingan negara-negara barat yang di pimpin oleh Amerika serikat di wilayah Timur tengah khususnya terhadap Normalisasi Diplomatik Dibawah Deklarasi Abraham Accord dari kaca mata National Interest. Normalisasi tersebut menuai banyak respon dan kecaman dari berbagai lapisan internasional yang terbagi menjadi pihak yang mendukung dan pihak yang menentang

Keyword: Konstelasi Politik, Normalisasi Diplomatik, palestina, israel

Abstract

The normalization that occurred between the two Gulf Arab countries, namely the United Arab Emirates and Bahrain against Israel, had a direct impact on Palestine, both politically and economically. The declaration, called the Abraham Accord, was brokered by the United States as a peace broker between Israel and the Gulf Arab countries, bringing many interests from various sides. This paper aims to find out how the impact of the normalization process for both Palestine and Israel from the perspective of geopolitics. On the other hand, this paper also wants to know what are the interests of the Uae, Bahrain and the interests of western countries led by the United States in the Middle East region, especially towards diplomatic normalization under the Abraham Accord Declaration from the perspective of National Interest. The normalization has attracted many responses and criticisms from various international layers which are divided into those who support and those who oppose.

Keyword : Political Constellation, Diplomatic Normalization, Palestine, Israel

DAFTAR SINGKATAN

UEA : Uni Emirat Arab

AS : Amerika Serikat

UNRAWA : The United Nations Relief and Work Agency for Palestine Refugees
In the Near East

PLO : Palestinian Liberations organisation

PA : Palestinian Authority

HAMAS : Harakat al-Muqawama al-Islamiyah

IAIA :International Atomic Energy Agency

DAFTAR ISI

COVER	
HALAMAN PENGESAHAN	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERNYATAAN	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
HALAMAN MOTO.....	vii
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR SINGKATAN.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
KATA PENGANTAR.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Kegunaan Penelitian.....	5
E. Tinjauan Pustaka.....	6
F. Kerangka Teori.....	8
1. Geopolitik....	8
2. Kepentingan nasional.....	10
G. Metodologi Penelitian..	12
1. Pendekatan/Metode Penelitian.....	12
2. Data dan Sumber Data.....	12

3. Teknik Pengumpulan Data	12
4. Teknik Analisa Data	12
5. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II GEOPOLITIK, KEPENTINGAN NASIONAL DAN NORMALISASI DIPLOMATIK	15
A. Geopolitik.....	15
B. Kepentingan Nasional.....	19
C. Normalisasi Diplomatik.....	22
BAB III LATAR BELAKANG KONFLIK PALESTINA DAN ISRAEL	33
A. Pofil Palestina.....	33
B. Profil Zionis Israel.....	40
C. Latar Belakang Konflik.....	42
D. Negara Barat yang memiliki kepentingan.....	44
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	49
A. Dampak Normalisasi terhadap Palestina dan Israel.	
1. Dampak terhadap Palestina.....	49
• .Pengarikan Kedutaan Besar	49
• Berhentinya Upaya Aneksasi Di Tepi Barat.....	51
• Pemangkasan Bantuan dana.....	53
2. Dampak terhadap israel.....	55
• Keuntungan politik dan kermanan di kawasan.. ..	55
• Kuntungan ekonomi.....	57
B. kepentingan UEA, Bahrain dan Kepentingan Intenasional.....	59
C. Respon Internasional dan Timur Tengah atas Normalisasi tersebut.....	71

BAB V PENUTUP	77
A. Kesimpulan... ..	77
B. Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA	80
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah Rabbil Alaamiin. Puji syukur dipanjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang telah memberikan rahmat dan karunianya yang tidak terbatas kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "Konstelasi Politik Palestina Di Timur Tengah Pasca Normalisasi Diplomatik UEA Bahrain dan Israel". Dengan segala bentuk upaya dan tantangan hingga dirampungkannya skripsi ini menjadi utuh, meskipun perlu disadari masih banyak kekurangan dalam skripsi ini dikarenakan keterbatasan dari penulis. Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari berbagai bantuan dan dukungan moril ataupun materil, baik berupa do'a maupun dukungan langsung. Terutama dari kedua orang tua penulis, yakni ayahanda Hanan Harom dan ibunda Cik Ibah serta kakaku Heppy Juliansyah yang telah memberikan seluruh jerih payahnya dalam mendukung penulis dari awal hingga terbentuknya skripsi ini. Serta dukungan dari kedua saudara penulis, Angra Dimas Pratama dan Andry Dimas Dwi Putra, yang menjadi penyemangat untuk segera menyelesaikan skripsi dan juga studi penulis. Tidak terlepas juga dari dukungan dan do'a dari seluruh keluarga besar yang tidak berhenti kepada penulis. Skripsi ini dikhususkan untuk keluarga penulis terutama kepada kedua orang tua yang telah menghidupi dari sejak lahir hingga saat ini. Selama dibentuknya skripsi ini, tentunya terdapat berbagai tantangan dalam proses penyelesaiannya sehingga membutuhkan banyak bantuan yang datang dari berbagai pihak yang belum dapat dijangkau oleh penulis. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih, kepada:

1. Prof. Dr Nyayu Khodijah, S.AG.,M.SI, selaku Rektor UIN Raden Fatah Palembang.
2. Ibu Dr Endang Rochmiatun, M.HUM, Selaku Dekan Fakultas Adab dan Humaniorah di Universitas Islam negeri Raden Fatah Palembang.
3. Bapak Dr. Ahmad syukri, S.IP., M.SI Selaku ketua Jurusan Program Studi Politik Islam dan Bapak Kiki Mikail, M.A.. Selaku Sekretaris Jurusan Politik

Islam Fakultas Adab & Humaniorah di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

4. Bapak Dr. Andi Candra Jaya, S.Ag.,M.Hum Selaku Pembimbing Utama yang telah memberikan pengarahan dalam penyelesaian skripsi,

5. Bapak Kiki Mikail, M.A Selaku Pembimbing Kedua yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan pengarahan membagi pengetahuan dalam perbaikan skripsi ini,

6. Segenap Dosen Fakultas Adab dan Humaniora yang senantiasa telah membimbing dan memotivasi serta mengajarkan ilmunya selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Adab dan Humaniora dan seluruh Staff Administrasi Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;

7. Saudara kandung penulis Abang Heppy Juliansyah, Ayuk Bellaria, Adik bungsuku yang tengah berjuang berkuliah semangat terus dan terima kasih telah menghibur dan membuat warna dalam kehangatan keluarga. Serta seluruh keluarga besar yang telah memberikan do'a, dukungan, semangat dan perhatian kepada penulis 8. Seluruh sahabat penulis terima kasih telah memberikan motivasi. Dan Semua pihak yang terkait dalam penulisan skripsi ini baik langsung maupun tidak langsung.

Semoga segala amal kebaikan yang bersangkutan bernilai ibadah disisi Allah SWT, dan semoga ilmu pengetahuan yang menjadi bekal penulis di kemudian hari dapat bermanfaat bagi keluarga, masyarakat, agama, nusa dan bangsa. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi kita semua serta bagi perkembangan hukum di masa yang akan datang. Aamiin, Yaa Rabbal'alamin

Palembang, November
2022

Penulis

Aidil Saputra

NIM. 1820404022

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konflik internasional yang berawal dari kebijakan politik merupakan salah satu isu hangat yang masih mewarnai politik internasional, salah satunya karena perebutan wilayah dan dominasi kepentingan negara. Konflik internasional mengenai batas wilayah yang terjadi dan belum terselesaikan hingga saat ini adalah konflik Israel dan Palestina. Konflik antara keduanya telah berlangsung selama beberapa dekade, terutama sejak Negara Zionis Israel didirikan pada 1948. Pada dasarnya, konflik antara Israel dan Palestina menyangkut pada dua masalah: hak orang Yahudi untuk hidup dan memilih negara mereka sendiri serta orang Palestina untuk mendirikan sebuah negara di atas tanahnya sendiri (Sukani, 2020, hal. 1)

Pada awalnya Israel dapat memasuki tanah palestina karena mendapat restu dari Inggris sebagai penguasa tunggal wilayah Palestina setelah Turki Utsmani runtuh pada akhir perang dunia ke dua. Konflik Israel- Palestina terjadi setelah adanya Deklarasi Balfour pada tanggal 31 Oktober 1917. Deklarasi tersebut berisi sinyal persetujuan dari pemerintah Inggris atas gagasan pendirian sebuah Negara Yahudi di atas tanah Palestina, Deklarasi ini menjadi pembuka bagi eksodus dan imigrasi besar besaran bangsa Yahudi dari seluruh penjuru dunia ke tanah Palestina. (Misri A. Muchsin, 2015 : 398)

Tepat pada puncaknya tanggal 14 Mei 1948 Israel memproklamasikan kemerdekaannya sebagai sebuah Negara bagi bangsa Yahudi, keberhasilan Israel

dalam menegakan sebuah Negara yahudi itu mewujudkan cita-cita dan amanat pengagas Negara Israel yaitu Theodore Herzl. (Firdaus & Yani : 2021 : 105). Mendengar hal itu negara-negara Arab yang bertetangga dekat dengan palestina seperti Mesir, Yordania, Lebanon Syria dan Irak langsung menggerakkan personel militer dan menyerang basis Israel, perang ini disebut perang Arab-Israel 1948. pada akhirnya peperangan tersebut dimenangkan oleh Israel yang hampir 70% menguasai wilayah Palestina. Namun pada kenyataanya pasca perang tersebut dengan sebagian wilayah tepi barat di bawah penguasaan Jordania dan Jalur Gaza berada di bawah naungan Mesir.(Azrul Azlan Abdul Rahman et al., 2018, hal. 83) Seharusnya jika melihat Resolusi PBB No 181 tahun 1947 pembagian wilayah telah di atur yaitu 56% untuk Israel dan 44% untuk Arab. (Sukani, 2020, hal. 2)

Negara-negara Arab dan Israel menganggap berperang secara langsung hanya menyisahkan kerugian fisik dan moril. Setelah Negara arab banyak mengalami kekalahan atas Israel, Israel dan Palestina termasuk negara-negara Arab mulai memasuki banyak Fase perundingan. Diantaranya Kesepakatan Oslo I, Kesepakatan oslo II, Kesepakatan Hebron, Kesepakatan Wye River I, Kesepakatan Wye River II, Kesepakatan camp david II, dan Konferensi Annapolis 2007. (Paat, 2013)

Dalam banyak negosiasi, Amerika Serikat sebagai sekutu dekat Israel selalu menjadi mediator, baik dalam negosiasi konflik Israel-Palestina maupun dalam negosiasi konflik antara Israel dan beberapa negara Arab. Amerika Serikat, sebagai negara adi daya mengklaim membawa perdamaian dunia, tidak tinggal diam atas konflik ini. Amerika Serikat sendiri memiliki hubungan diplomatik

yang sangat baik dengan Israel, yang membuat Palestina merasa tidak adil, ditambah dengan berbagai isu seperti persetujuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan pemindahan kantor kedutaan AS ke Tel Aviv, Israel, Israel telah menghilangkan tanda-tanda wilayah Palestina. peta. Sementara ini menjadi masalah, ketidaksetujuan Palestina terhadap tindakan AS telah mempersulit Palestina untuk menerima kesepakatan damai yang diusulkan. (Saputra, 2021, hal. 5)

Pada tanggal 15 September 2020 dunia Islam khususnya Timur Tengah dikejutkan dengan normalisasinya hubungan diplomatik Uni Emirat Arab, Bahrain dan Israel. Perbaikan hubungan tersebut termaktub dalam dokumen perdamaian *Abraham Accord* yang di prakarsai oleh Amerika Serikat sebagai penengah. Penandatanganan dokumen tersebut dilakukan di Gedung Putih, Washington DC. Bersama dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Presiden AS Donald Trump, Uni Emirat Arab diwakili oleh Abdullah bin Zayed al-Nahyan, menteri luar negeri Uni Emirat Arab, dan Abdullatif al-zayani, menteri luar negeri Bahrain. (Fea, 2020)

Perjanjian tersebut menjadi pukulan tambahan bagi perjuangan Palestina khususnya rakyat Palestina dalam membela hak mereka atas pendudukan Israel, beragam respon dan kecaman datang dari dalam Palestina sendiri hingga Negara luar yang komit satu komando mendukung Palestina, kendati demikian kepentingan Negara menjadi hal mutlak bagi Bahrain juga Uni Emirat Arab. Dengan memperbaiki hubungan dengan Israel akan semakin mempermudah posisinya mendapat akses bantuan dan kerja sama di berbagai bidang.

Disisi lain cita-cita utama agar Palestina dapat berdiri menjadi sebuah Negara yang merdeka dengan batas-batas wilayah sesuai Resolusi PBB 181 semangkin buram. Adanya Normalisasi diplomatik Uni Emirat Arab, Bahrain atas Israel terlihat lebih berat pada titik kepentingan negara mereka ketimbang melihat dari aspek kepentingan dan tujuan palestina agar menjadi sebuah Negara yang merdeka.

B. Rumusan Masalah

Penulis membatasi lingkup penelitian hanya pada dua negara arab saja yang sudah melakukan kebijakan Normalisasi dengan israel, pasalnya ada beberapa negara arab khususnya yang telah terlebih dahulu melakukan Normalisasi Diplomatik dengan israel seperti Mesir, Jordania, Sudan dan Maroko Dalam Pembahasan ini Normalisasi Diplomatik antara israel dengan kedua negara Arab Teluk yaitu UEA dan bahrain, Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah yang telah dikemukakan, Maka peneliti membuat formulasi pertanyaan penelitian (Research Question) sebagai berikut ;

1. Apa Dampak dari Normalisasi tersebut bagi Palestina dan Israel..
2. Bagaimana kepentingan Internasional di Timur Tengah dan kepentingan Uni Emirat Arab, Bahrain terhadap Normalisasi tersebut.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini yaitu untuk memberikan jawaban atas pertanyaan penelitian.

1. Untuk mengentahui dampak yang ditimbulkan dari Normalisasi Diplomatik UEA,Bahrain dengan Israel bagi palestina

2. Untuk mengetahui Bagaimana kepentingan Internasional dan kepentingan Uni Emirat Arab, Bahrain terhadap Normalisasi tersebut

D. Kegunaan penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para pembaca dan pihak-pihak yang tertarik dan menaruh berkepentingan dengan permasalahan yang telah diuraikan, sehingga tulisan ini dapat menjadi acuan. Kegunaan penelitian ini antara lain :

1. Kegunaan terhadap peneliti

Penelitian ini dimungkinkan agar memberikan manfaat pemahaman Mengenai Konstelasi Politik Palestina di Timur Tengah pasca Normalisasi Dipomatik Uni Emirat Arab, Bahrain dan Israel dan juga kepentingan negara yang terlibat di dalamnya

2. Kegunaan terhadap akademik

Sebagai lulusan Sarjana Politik Islam kita dituntut untuk tidak hanya memahami masalah Politik yang ada di dalam negeri, lingkungan sekitar tetapi lulusan sarjana Politik Islam harus memahami situasi dunia saat ini khususnya dinamika konflik politik yang melibatkan negara Islam yang ada di Timur tengah kemudian juga dalam rangka memberikan informasi dan bahan referensi, khususnya bagi akademisi dan pemerhati fenomena global, terkait kajian dinamika kawasan Timur Tengah, khususnya yang berkaitan dengan judul skripsi tentang Konstelasi Politik Palestina di Timur Tengah. setelah Normalisasi Diplomatik Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Israel.

3. Kegunaan praktis

Agar dapat menjadi bahan pembahasan dalam melihat peta Konflik Palestina-Israel dan hubungan Arab-Israel serta sebagai awal untuk memperluas khazanah pengetahuan terkait peta konflik di dunia internasional

E. Tinjauan Pustaka

Untuk mendukung uraian teoritis di atas, antara lain diuraikan beberapa buku dan sumber penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini dan yang pernah dilakukan sebelumnya :

Pertama, buku yang ditulis oleh Riza Sihbudi, yang berjudul *“menyandera timur tengah : kebijakan as dan israel atas negara-negara muslim”* buku ini memberikan penjelasan mengenai Timur Tengah dan situasinya serta memberikan data valid terkait kebijakan internasional terhadap konflik yang berkepanjangan di Timur Tengah terkhusus konflik antara Israel-Palestina dan Israel ke negara-negara Arab.(Sihbudi, 2007)

Kedua, Jurnal yang berjudul **Kepentingan Negara-Negara Arab (Uni Emirat Arab, Bahrain, Sudan dan Maroko) Melakukan Normalisasi Hubungan dengan Israel**, Jurnal ini di tulis oleh Yulia Rimapradesi dan Ahmad Sahide yang membahas bagaimana proses Normalisasi antar ke empat negara yang sama-sama berada dalam barisan Islam melakukan kerja sama hubungan dengan Israel. Mengangkat teknik pilihan rasional, yang mengkaji bagaimana sebuah pilihan dibuat untuk mewujudkan tujuan yang mereka anggap terbaik untuk kepentingan negara mereka.(Rimapradesi & Sahide, 2021)

Ketiga, dalam jurnal yang berjudul **“Pengaruh Hegemoni Amerika Serikat terhadap proses Rekonsiliasi Hamas dan Al-fatah”** (Al-asyura, 2019). Di tulis

Oleh Muhammad Khairil Zaki Al-Asyura. Jurnal ini membahas bagaimana Hegemoni Amerika Serikat di Timur Tengah memberikan dampak yang sangat besar terhadap tujuan dan cita-cita rakyat Palestina agar dapat lepas dan bebas menjadi Negara yang merdeka, terlebih setelah AS Menjadi teman dekat Israel sehingga memperkeruh situasi Palestina, jurnal ini membahas secara luas mengenai perselisihan antara Fatah dan Hamas yang turut memperlambat pengakuan kedaulatan Palestina semakin tidak menentu. Jurnal ini menjelaskan secara jelas historis konflik dan lika-liku rekonsiliasi yang ada antara Fatah dan Hamas di tengah Hegemoni Amerika Serikat.

Keempat, Dalam Sebuah Jurnal **“Normalisasi Hubungan Uni Emirat Arab dengan Israel: Kepentingan Nasional Versus Solidaritas Negara Muslim terhadap Palestina** (Wicaksono, 2020b) di tulis oleh Raden Ananto Djoko jurnal ini membahas bagaimana Uni Emirat Arab (UEA) dan Israel yang memulai proses perbaikan hubungan di bawah Dokumen *Abraham accord* yang di tengahi AS. Jurnal ini menjelaskan secara gamblang bagaimana kepentingan nasional menjadi tujuan utama Normalisasi hubungan antara UEA dan Israel. Ditambah adanya pengaruh dari Iran yang kerap kali menjadi ancaman di kawasan dan sangat rentan pengaruhnya terhadap Monarki Teluk seperti Uni Emirat Arab.

Beberapa studi terkait menunjukkan adanya faktor kepentingan dari UEA maupun Bahrain dalam melakukan Normalisasi. Rumitnya perjuangan Palestina untuk mendapat pengakuan kedaulatan sebagai sebuah negara yang merdeka, dikarenakan banyaknya pengaruh dari luar yang melemahkan solidaritas dukungan terhadapnya. Sehingga terjadilah perbaikan hubungan, kerja sama dan

Normalisasi Diplomatik dengan Israel. Peneliti berusaha menghadirkan Penelitian baru dengan mengkaji dampak/pengaruh yang ditimbulkan dari Normalisasi tersebut dan seperti apa kepentingan UEA dan Bahrain dalam Normalisasi tersebut serta melihat bagaimana Respon internasional Khususnya Timur Tengah terhadap Normalisasi tersebut. Hal ini dimungkinkan bagi peneliti untuk mendapatkan data dari sampel jurnal dan buku-buku yang peneliti pelajari karena memiliki relevansi yang layak dengan pokok bahasan penelitian.

F. Kerangka Teori

Penelitian ini akan menggunakan Teori Geopolitik oleh Rudolf Kjellen, agar dapat menjawab permasalahan pada point pertama dari aspek geopolitik tetapi saya juga menggunakan konsep kepentingan nasional (*National interest*) oleh Donald E. Nuechterlein sebagai cara untuk menjawab permasalahan pada point ke dua.

1. Teori Geopolitik

Secara umum, geopolitik merujuk pada hubungan antara politik dan teritori dalam skala lokal atau internasional. Secara spesifik, geopolitik merupakan metode analisis yang berupaya memahami, menjelaskan, dan memperkirakan perilaku politik internasional dalam variabel geografi. Variabel geografi tersebut umumnya mengarah pada: lokasi geografis negara atau negara yang dipertanyakan, ukuran negara yang terlibat, iklim wilayah tempat negara tersebut berada, topografi wilayah, demografi, sumber daya alam, dan perkembangan teknologi. Sehingga secara umum dapat disimpulkan: Geopolitik

mencakup praktik analisis, prasyarat, perkiraan, dan pemakaian kekuatan politik terhadap suatu wilayah (geografis).

Teori Rudolf Kjellen mengenai Geopolitik dapat diuraikan dalam 3 point :

a. Negara adalah hasil perpaduan antara biologi dan makhluk hidup yang cerdas. Negara bertujuan untuk menghadirkan platform yang luas dengan posisi seperti itu sehingga kualitas dan kekuatan rakyatnya dapat tumbuh secara alami.

b. Geopolitik, demo politik, ekonomi politik serta politik krato semuanya digabung menjadi satu sistem politik dalam negara.

c. Negara dapat mandiri dan memanfaatkan kemajuan dengan mendorong pembangunan di bidang kebudayaan dan teknologi untuk memperkuat kekuatan nasionalnya, baik secara internal untuk mencapai persatuan dan kesatuan yang harmonis maupun di luar untuk mencapai batas-batas negara yang lebih besar. Sementara itu, kekuasaan Imperium Kontinental dapat mengatur kekuatan maritime. (Aldino, 2017)

dari point di atas secara spesifik Rudolf Kjellen membagi dan menguraikan geopolitik dalam 4 point sebagai berikut :

- Negara (*Das reich*), menurut Kjellen terdapat tiga sub Negara (*Das Reich*), menurut Kjellen terdapat tiga subkategori yang membentuk identitas geospasial: *topopolitik* (posisi negara), *morfopolitik* (konfigurasinya), dan *Physiopolitik* (wilayah).
- The Nation (*Das Staabfolk*), elemen demografis dimanifestasikan melalui tiga faktor: Etnopolitik (kesadaran akan sebuah etnis), The Plethopolitics (keberadaan ragawi sebuah etnis) dan *Psychopolitics* (jiwa/roh bangsa)

- Masyarakat (*Die Gesellschaft*) atau Sosiopolitik melalui struktur dan bentuk sosial (*Filopolitik*), serta kehidupan sosial (*Biopolitik*).
- Ekonomi Negara (*Ökopolitik*) yakni kemampuan bertahan melalui fungsi memenuhi kebutuhan populasi (Autarhiopolitik), hubungan perdagangan eksternal (*The Emporopolitics*), kehidupan ekonomi (*The Economopolitics*).
- Pemerintah (*Das Staatsregiment*) atau Kratopolitics. Otoritas pemerintah menerapkan politiknya dengan bentuk pemerintahan (*Nomopolitik*), administrasi (*Praxiopolitik*), kewenangan pemerintah (*Arhopolitik*)

2. Konsep kepentingan nasional

Donald E. Nuechterlein mendefinisikan istilah "Kepentingan Nasional" sebagai kebutuhan yang dialami suatu bangsa terhadap bangsa lain yang membentuk lingkungan eksternalnya. Donald E. Nuechterlein membagi kepentingan nasional menjadi 4 kategori, atau empat kepentingan mendasar suatu bangsa, yaitu:

- *Defense Interest*: "Security of the nation state and its citizens from externally inspired threats to the national political system as well as protection from the danger of physical violence by another nation". Kepentingan pertahanan yaitu perlindungan keamanan negara bangsa dan warga negaranya dari ancaman eksternal terhadap sistem politik nasional serta perlindungan dari bahaya kekerasan fisik oleh bangsa lain.
- *Economic Interest*: "improvement of economic well-being in respect to other countries and advancement of national interest". Kepentingan ekonomi

yaitu peningkatan kesejahteraan ekonomi terhadap negara lain dan kemajuan kepentingan nasional.

- *World Order Interest: "The upkeep of the global political and economic order, which gives nations a sense of security and allows people and businesses to conduct themselves in safety outside their national borders, is in the interests of the world order"*. Pemeliharaan tatanan politik dan ekonomi global, yang memberikan rasa aman kepada negara-negara dan memungkinkan orang dan bisnis untuk berperilaku aman di luar perbatasan nasional mereka, adalah demi kepentingan tatanan dunia.

- *Ideological Interest: "the protection of values that a sovereign citizen may have is an ideological interest"*. Perlindungan nilai-nilai yang mungkin dimiliki warga negara berdaulat adalah kepentingan ideologis. (Rozy, 2017, hal. 89)

Berikut adalah kerangka diagram yang dipetakan oleh Donald E. Nuchterlain terkait kepentingan nasional.



Sumber : Nuchterlein, 1976 dalam (Hakiki & Sari : 2022 : 98)

G. Metodologi Penelitian

1. Pendekatan penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan strategi deskriptif kualitatif, yang mengacu pada rumusan masalah yang akan mengarahkan penelitian untuk mengkaji atau menggambarkan skenario secara menyeluruh, mendalam serta luas. Menurut Bogdan dan Taylor, yang dikutip oleh Lexy.J. Moleong, mendefinisikan pendekatan kualitatif sebagai metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata lisan atau tertulis dari subjek dan perilaku yang diamati. (Moelong, 2007)

2. Sumber Data

Dua jenis sumber akan dihasilkan dari data yang digunakan dalam penelitian ini: pertama, sumber primer yang berasal dari berita dan situs resmi media. Kedua, sumber sekunder yang berasal dari temuan penelitian atau bahan yang sudah diterbitkan dalam bentuk buku, artikel jurnal, makalah, data, dan sumber lain diperlukan untuk penelitian ini.

3. Teknik pengumpulan data

Metode telaah pustaka akan digunakan oleh penulis. Telaah pustaka adalah kumpulan informasi yang mempelajari dan menganalisis karya yang diterbitkan seperti buku, jurnal, dokumen, surat, situs web resmi, atau laporan baik online maupun offline yang terkait dengan topik yang diselidiki.

4. Teknik analisis data

Teknik analisis data yang penulis gunakan yaitu kualitatif, dimana persoalan digambarkan dan dianalisis berdasarkan fakta-fakta yang ada, lalu dari data

tersebut mana yang dapat diolah dan dicocokkan berdasarkan pada konseptual dalam kerangka teoritis.

5. Sistematika Penulisan

Dengan menulis isi studi ke dalam lima bab, yang masing-masing memiliki sejumlah sub-bab, dimungkinkan untuk meninjau masalah penelitian, metode serta analisis masalah sambil juga memahami isinya dengan lebih baik. Berikut ini adalah uraian tentang sistematika penelitian ini yang dilampirkan:

BAB I ; Merupakan pendahuluan yang menjelaskan latar belakang ,pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian.

BAB II : Pada bab ini peneliti akan menuliskan tinjauan teoritis yang berkaitan dengan teori-teori yang meliputi pembahasan mengenai Teori Geopolitik, konsep Normalisasi Diplomatik, konsep kepentingan nasional (*National interest*),

BAB III : Dalam bab ini penulis akan menyajikan pembahasan mengenai latar belakang konflik Israel-Palestina termasuk profil Palestina dan faksi yang ada di dalamnya, dinamika politik di Timur Tengah serta historis perang dan perdamaian Arab-Israel

BAB IV : Dalam bab ini peneliti menjelaskan poin-poin pembahasan inti dari kajian yang telah diteliti dan hasil penelitian yang telah didapatkan, dalam hal ini hasil yang ingin didapatkan dan dibahas pada bab ini adalah pengaruh yang di timbulkan dari Normalisasi UEA, Bahrain dan Israel teradap Palestina, serta melihat sisi apa saja kepentingan yang di ambil UEA, Bahrain dan juga

kepentingan Internasional di Timur Tengah di akhir bab ini juga kita menjelaskan berbagai respon internasional terhadap Normalisasi tersebut.

BAB V : Bab lima berisi kesimpulan dari keseluruhan penelitian yang telah dilakukan. Juga berisi tentang pertanyaan penelitian yang akan di jawab sesuai dengan hasil penelitian yang didapat.

BAB II

GEOPOLITIK, KEPENTINGAN NASIONAL DAN NORMALISASI

DIPLOMATIK

A. Geopolitik

1. Pengertian Geopolitik

Pengertian geopolitik adalah suatu cara atau metode analisis kebijakan luar negeri yang berupaya memahami, menjelaskan, dan memperkirakan perilaku politik internasional dalam variabel geografi. Menurut pendapat lain, geopolitik merupakan kebijakan politik suatu negara yang memanfaatkan geografi sebagai basis penguasaan ruang hidup dengan tujuan untuk menjamin kelangsungan dan pengembangan kehidupan negara yang bersangkutan. Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa geopolitik adalah suatu sistem politik yang di dalamnya terdapat peraturan-peraturan dalam kebijaksanaan serta strategi nasional. (Prawiro, 2020)

Dari Budi Juliardi bahwa secara etimologi, geopolitik asal asal bahasa Yunani, yaitu Geos yg berarti bumi (termasuk ruang/daerah atau geografi) yg menjadi kawasan hayati serta pemberi kehidupan dan wilayah negara. ad interim itu politik berasal asal kata "Politeia". Politeia itu sendiri asal dari istilah "polis" yg berarti "Kota/negara atau kesatuan rakyat yang berdiri sendiri, dan "Teia" yang berarti kebijakan/urusan yang bermakna kepentingan umum warga negara suatu bangsa. Jadi politeia berarti kebijakan penyelenggaraan negara. Menurut Kamus akbar Bahasa Indonesia (KBBI), geopolitik adalah ilmu ihwal faktor geografi terhadap ketatanegaraan atau menggunakan istilah lain KBBI juga mengartikan

geopolitik menjadi kebijakan negara atau bangsa sinkron dengan posisi geografisnya (Area, 2022)

Menurut *Arjuna Putra aldino* dalam *Kajian Ketahanan Nasional Sekolah Kajian Strategik dan Global Universitas Indonesia* mengatakan secara umum geopolitik merujuk pada hubungan antara politik dan teritori dalam skala lokal atau internasional. Namun secara spesifik geopolitik merupakan metode analisis yang berupaya memahami, menjelaskan, dan memperkirakan perilaku politik internasional dalam variabel geografi. Variabel geografi tersebut umumnya mengarah pada: lokasi geografis negara atau negara yang dipertanyakan, ukuran negara yang terlibat, iklim wilayah tempat negara tersebut berada, topografi wilayah, demografi, sumber daya alam, dan perkembangan teknologi. Sehingga secara umum dapat disimpulkan: Geopolitik mencakup praktik analisis, prasyarat, perkiraan, dan pemakaian kekuatan politik terhadap suatu wilayah (geografis). (Aldino, 2017)

Istilah "Geopolitik" pertama kali digunakan oleh ilmuwan bumi Frederich Ratzel (1844–1904), dan selanjutnya diperluas oleh politisi geografis Rudolf Kjellen (1864–1922). Kedua item memiliki titik fokus yang sama sekali berbeda. Geopolitik menyelidiki fenomena politik dari perspektif geografis, sedangkan Ilmu Bumi politik mengeksplorasi fenomena geografis dari perspektif politik. Definisi geopolitik adalah "Geografi Politik Terapan.

Dalam konsep geopolitik ada 2 pengertian yang terkandung :

1. Geopolitik sebagai ilmu: Memberikan wawasan objektif tentang situasi kita sebagai negara yang hidup berdampingan dengan negara lain dan terlibat dalam interaksi internasional.

2. Geopolitik sebagai ideology adalah ideologi yang berusaha membangun pemahaman sebagai pandangan bersama dalam rangka menegakkan, melestarikan, dan mempertahankan semangat nasionalisme.

Teori Kjellen dengan tegas menegaskan bahwa negara adalah makhluk hidup. Ratzel berusaha menerapkan teknik biologis teori evolusi Darwin, yang sangat disukai di Eropa pada akhir abad kesembilan belas, ke dalam teorinya tentang ruang. Tesis mendasar Ratzel adalah bahwa negara adalah organisme yang tunduk pada aturan biologi.

Ide pokok teori Kjellen adalah sebagai berikut:

a. Negara adalah entitas biologis, makhluk hidup yang hidup. Negara mampu memperoleh wilayah yang cukup besar untuk memungkinkan pengembangan bakat dan kekuatan warganya tanpa batas..

b Geopolitik, demo politik, ekonomi politik serta politik krato semuanya digabung menjadi satu sistem politik dalam negara.

c. Negara dapat mandiri dan memanfaatkan kemajuan dengan mendorong pembangunan di bidang kebudayaan dan teknologi untuk memperkuat kekuatan nasionalnya, baik secara internal untuk mencapai persatuan dan kesatuan yang harmonis maupun di luar untuk mencapai batas-batas

negara yang lebih besar. Sementara itu, kekuasaan Imperium Kontinental dapat mengatur kekuatan maritime. (Sulisworo, 2012)

Dalam Karyanya yang paling dikenal *staten som liffsform* dalam (Aldino, 2017) ia mengungkapkan lima elemen mendasar sebagai kekuatan (vital power) yang mengorganisasikan keberadaan negara :

- Negara (*Das reich*), menurut Kjellen terdapat tiga sub Negara (*Das Reich*), menurut Kjellen terdapat tiga subkategori yang membentuk identitas geospasial: *topopolitik* (posisi negara), *morfopolitik* (konfigurasinya), dan *Physiopolitik* (wilayah).
- The Nation (*Das Staabfolk*), elemen demografis dimanifestasikan melalui tiga faktor: Etnopolitik (kesadaran akan sebuah etnis), The Plethopolitics (keberadaan ragawi sebuah etnis) dan *Psychopolitics* (jiwa/roh bangsa)
- Masyarakat (*Die Gesellschaft*) atau Sosiopolitik melalui struktur dan bentuk sosial (*Filopolitik*), serta kehidupan sosial (*Biopolitik*).
- Ekonomi negara (*Ökopolitik*) yakni kemampuan bertahan melalui fungsi memenuhi kebutuhan populasi (Autarhiopolitik), hubungan perdagangan eksternal (*The Emporopolitics*), kehidupan ekonomi (*The Economopolitics*).
- Pemerintah (*Das Staatsregiment*) atau Kratopolitics. Otoritas pemerintah menerapkan politiknya dengan bentuk pemerintahan (*Nomopolitik*), administrasi (*Praxiopolitik*), kewenangan pemerintah (*Arhopolitik*)

2. Fungsi Geopolitik

Berikut ini adalah beberapa fungsi geopolitik secara umum (Prawiro, 2020):

- Geopolitik sebagai konsepsi ketahanan nasional sebagai konsep dalam pembangunan, pertahanan keamanan serta kewilayahan.
- Geopolitik sebagai pembangunan nasional yang mencakup kesatuan politik, sosial dan ekonomi, sosial politik, kesatuan pertahanan serta keamanan.
- Geopolitik sebagai pertahanan dan keamanan dalam pandangan geopolitik sebagai satu kesatuan pada seluruh wilayah serta segenap kekuatan negara.
- Geo Politik sebagai wawasan kewilayahan dalam mengatur pembatasan negara untuk menghindari adanya sengketa antarnegara tetangga.

B. Kepentingan Nasional (*National interest*)

Hans J. Morgenthau mengatakan bahwa kepentingan nasional adalah kemampuan dari suatu negara untuk melindungi dan mempertahankan identitas fisik, politik dan kultur dari gangguan negara lain. Menurut Scott Bruchil, kepentingan nasional dapat digunakan secara terpisah, walaupun demikian hal ini berkaitan satu sama lain. Kepentingan nasional digunakan dalam dua cara, pertama untuk menjelaskan dan menentang kebijakan luar negeri, kedua digunakan sebagai alat untuk menganalisis dan menjelaskan tentang tingkah laku negara dalam urusan-urusan luar negeri. Dalam hal ini kepentingan nasional juga digunakan untuk membentuk tindakan politik dalam tujuan untuk mempertahankan, menentang dan mengajukan kebijakan. (Manurung, 2021)

Menurut Donald. E. Nuechterlein, secara sederhana kepentingan nasional bisa diartikan sebagai kepekaan dalam mengetahui kebutuhannya dari suatu negara yang berdaulat dimana kebutuhan tersebut terdapat dalam ruang negara lain dan di luar lingkungan negara tersebut . Dari pengertian diatas bisa dipahami bahwa kepentingan nasional inilah yang akhirnya mendorong negara untuk mengeluarkan suatu kebijakan luar negeri dalam upaya untuk mencapai kepentingan tersebut. Maka dari itu dalam proses kebijakan luar negeri akan sejalan dengan kepentingan nasional suatu negara

Donald E. Nuechterlein mendefinisikan istilah "Kepentingan Nasional" sebagai kebutuhan yang dialami suatu bangsa terhadap bangsa lain yang membentuk lingkungan eksternalnya. Donald E. Nuechterlein membagi kepentingan nasional menjadi 4 kategori, atau empat kepentingan mendasar suatu bangsa, yaitu:

- Defense Interest: *“Security of the nation state and its citizens from externally inspired threats to the national political system as well as protection from the danger of physical violence by another nation”*. Kepentingan pertahanan yaitu perlindungan keamanan negara bangsa dan warga negaranya dari ancaman eksternal terhadap sistem politik nasional serta perlindungan dari bahaya kekerasan fisik oleh bangsa lain.

- Economic Interest: *“improvement of economic well-being in respect to other countries and advancement of national interest”*. Kepentingan ekonomi yaitu peningkatan kesejahteraan ekonomi terhadap negara lain dan kemajuan kepentingan nasional.

- World Order Interest: *“The up keep of the global political and economic order, which gives nations a sense of security and allows people and businesses to conduct themselves in safety outside their national borders, is in the interests of the world order”*. Pemeliharaan tatanan politik dan ekonomi global, yang memberikan rasa aman kepada negara-negara dan memungkinkan orang dan bisnis untuk berperilaku aman di luar perbatasan nasional mereka, adalah demi kepentingan tatanan dunia.

- Ideological Interest: *“the protection of values that a sovereign citizen may have is an ideological interest”*. Perlindungan nilai-nilai yang mungkin dimiliki warga negara berdaulat adalah kepentingan ideologis. (Rozy, 2017, hal. 89)

Berikut adalah kerangka diagram yang di petakan oleh Donald E. Nuchterlain terkait kepentingan nasional.



Sumber : Nuchterlein, 1976 dalam (Hakiki & Sari : 2022 : 98)

Pada penjelasan tadi, dapat dijelaskan bahwa kepentingan Nasional merupakan tujuan-tujuan yang berusaha diraih oleh setiap Negara bangsa untuk memenuhi kebutuhan masing-masing negara. Dengan demikian secara umum,

kepentingan nasional setiap negara relative sama, yaitu keamanan dan kesejahteraan.

Walaupun sampai saat ini kepentingan nasional Palestina masih belum menemukan titik kejelasan seperti pengembalian hak-hak mereka atas wilayah yang di duduki secara ilegal oleh Israel. Namun yang lebih diuntungkan disini adalah Uni Emirat Arab dan Bahrain, bagi kedua Negara untuk mencukupi kepentingan nasional merupakan hal yang fundamental dan mendasar bagi kelangsungan negaranya. Kepentingan nasional yang berusaha dicapai oleh Uni Emirat, Arab dan Bahrain adalah kesejahteraan ekonomi, teknologi dan kestabilan politik dan keamanan, serta perdamaian. Keempat hal tersebut harus berjalan secara beriringan. Oleh karena itu demi mencapai hal tersebut, UEA dan Bahrain tidak mempertahankan inisiatif Arab *peace 2002* yang mengusung Palestina sebagai negara yang merdeka, demi mencapai kepentingan nasionalnya

C. Normalisasi Diplomatik

Normalisasi merupakan sebuah konsep atau cara dan upaya yang ingin dilakukan dalam mengembalikan keadaan sebelumnya kepada situasi yang lebih baik. Normalisasi pada dasarnya merupakan suatu aktor atau sebuah pihak yang sedang berhadapan dengan pihak lainnya. Baik itu sebagai seorang individu, kelompok, Bahkan negara sekalipun yang berusaha mencapai keadaan perbaikan Dan keadaan normal tersebut. Setiap aktor atau pihak berusaha dengan berbagai cara agar sampai pada titik normal, karena sebelumnya hubungan antara aktor atau pihak terasa kurang begitu baik.

Problem/masalah yang termasuk di dalamnya adalah konflik, perselisihan, ketegangan, sehingga menimbulkan rasa tidak suka satu sama lain, mungkin disebabkan karena kesalahpahaman atau memang justru karena arogansi salah satu pihak, hubungan seperti apabila terjadi dan semakin memanas tentu akan menggeret kedua belah pada eskalasi yang semakin berbahaya, hingga berdampak pada berakhirnya hubungan kedua belah pihak. jika kedua belah pihak atau aktor tersebut adalah negara, maka akan berdampak pada rusaknya hubungan kedua negara, kandasnya kerja sama diplomasi dan krisisnya stabilitas kawasan di zona tersebut.

Agar hubungan dapat kembali stabil dan tetap terjaga, diperlukan usaha-usaha untuk mengembalikannya pada keadaan Normal atau keadaan seperti sebelum hubungan memburuk. Berbagai upaya dilaksanakan agar setiap aktor mau mengakhiri hubungan buruknya, dan menghilangkan faktor-faktor penyebab hubungan buruk itu terjadi. Maka usaha normalisasi dapat membawa dampak positif terhadap hubungan antar negara.

Agar hubungan tetap kokoh dan terjaga, harus ada upaya untuk mengembalikannya kepada suasana yang kondusif atau normal sama seperti keadaan sebelum memburuk. Berbagai upaya telah dilakukan agar setiap aktor ingin berhenti dari hubungan yang buruk, dan menghilangkan unsur-unsur yang menyebabkan terjadinya hubungan yang mengindikasikan kearah buruk. Jadi upaya normalisasi dapat memiliki dampak menguntungkan pada hubungan diantara negara.

Untuk menelaah lebih dalam mengenai konsep normalisasi dalam tinjauan pustaka penelitian ini, penulis meninjau kerangka berpikir dari R.P. Barston melalui bukunya yang berjudul *Modern Diplomacy*. Definisi dari Normalisasi menurut *Barston* ditegaskan bahwa

“normalisation is seen as a process involving: recognition of the need for measures to reduce tension or friction, and their introduction; promotion of improved relations; and isolation, containment or resolution – wholly or partly – of major sources of dispute or tension”. (Barston, 2014 : 275)

“normalisasi dilihat sebagai proses yang melibatkan: pengakuan akan kebutuhan akan langkah-langkah untuk mengurangi ketegangan atau gesekan, dan pengenalannya; promosi hubungan yang lebih baik; dan isolasi, penahanan atau penyelesaian – seluruhnya atau sebagian – dari sumber utama perselisihan atau ketegangan”

Normalisasi dipandang sebagai upaya untuk kepentingan masing-masing negara sebagai aktor yang terkait. Jika salah satu atau semua negara menyadari bahwa hubungan mereka salah atau tidak berjalan harmonis, maka perlu dilakukan upaya untuk menguranginya dengan mencari jalan keluar dan memecahkan masalah yang menyebabkannya. Masalah yang membutuhkan upaya sehingga terselesaikan dan membawa dampak terhadap lancarnya roda diplomasi.

Untuk mengatasi masalah tersebut, Barston menyusun langkah-langkah untuk memecahkan masalah tersebut. Antara lain, Barston memasukkannya ke dalam 10 tahap normalisasi;

1. Menjalinkan hubungan baik melalui jalur resmi maupun tidak resmi

2. Komunikasi informal seperti gencatan senjata dan/atau pertukaran tahanan yang berlangsung
3. Menjalinkan hubungan informal secara rahasia dan menjalin hubungan diplomatik dalam skala terbatas. ini disebut pensinyalan tingkat rendah.
4. Pembukaan kembali hubungan komersial dan perbankan secara terbatas.
5. Saluran negosiasi yang dibuka melalui pihak ketiga baik secara langsung maupun diam-diam.
6. Penghapusan hambatan perdagangan dan embargo.
7. Revisi kebijakan yaitu. revisi kebijakan terkait proses normalisasi.
8. Negosiasi tentang isu-isu utama normalisasi.
9. Kesepakatan dibuat untuk menormalkan dan memulihkan hubungan diplomatik.
10. Menerapkan normalisasi.(Barston, 2014 : 280)

Kesepuluh tahapan tersebut dapat terjadi karena faktor-faktor yang mempengaruhinya. Berdasarkan faktor dalam dan luar negeri, tingkat komunikasi antara aktor yang terlibat, dan sejauh mana penghapusan kasus dan kontrak dapat dicapai. Konvergensi juga sangat penting untuk mencapai normalisasi. Karena tentunya masih ada kendala dalam upaya pemulihan, diperlukan akses pendekatan .(Barston, 204 : 281)

Dalam proses normalisasi hubungan diplomatik, negara-negara yang telah gagal atau putus hubungan terlebih dahulu akan mengadakan serangkaian pertemuan informal untuk membahas bagaimana memecahkan masalah untuk mencapai normalisasi. Pertemuan formal digelar untuk membahas lebih lanjut

proses normalisasi tersebut. Pada masa puncaknya, negara-negara menyepakati serangkaian transaksi yang dibahas untuk mencapai normalisasi. Selanjutnya, kondisi hubungan menjadi formal dikembangkan dan seperangkat pedoman yang disepakati tentang keberlanjutan untuk diterapkan di sektor-sektor yang diperlukan. (Barston, 2014 : 283)

Fokus normalisasi awalnya hanya melihat pada kebutuhan yang paling mendesak. Oleh karena itu, semua pihak harus memahami pentingnya tujuan mencapai normalisasi, secara umum menghilangkan semua batas, hambatan dan larangan, menyelesaikan perselisihan dan memastikan kerja sama tidak dapat dihindari. Dan masing-masing pihak siap menerima ini

Proses ini membutuhkan waktu untuk meyakinkan para pihak untuk melakukan kesepakatan bersama setelah berakhirnya negosiasi untuk memperkuat bentuk hubungan diplomatik menjadi lebih baik. Bentuk normalisasi yang sebenarnya ditandai dengan sikap saling diplomasi negara-negara yang bersangkutan dalam bentuk itikad baik dan hubungan diplomatik untuk melanjutkan normalisasi.

Dalam penelitian ini, Israel melakukan berbagai upaya sehingga proses perbaikan hubungan atau normalisasi dengan berbagai negara Timur Tengah khususnya UEA, dan Bahrain berjalan baik, sebagai upaya untuk melancarkan segala bentuk kerja sama bilateral. Hubungan antar ke tiga negara tidak begitu baik, mengingat sebelumnya palestina lebih menjadi prioritas utama bagi negara arab teluk, dibanding membuka hubungan diplomatik dengan Israel yang jelas jelas bertentangan dengan prinsip OKI dan Liga Arab. Namun pada kenyataannya

setelah banyak fase pergolakan politik di Timur Tengah serta opsi kepentingan negara yang lebih tajam menyebabkan terjadinya normalisasi diplomatik. Disisi lain Israel mengalami berbagai konflik dengan beberapa negara di kawasan khususnya Iran, tidak adanya hubungan dengan negara tetangga, terasa kurang baik terisolasi secara politik, tidak berpartisipasi dalam forum atau kerja sama regional. Itulah sebabnya Israel secara hati-hati dan bijaksana berusaha menormalkan hubungan diplomatik guna menjaga stabilitas kawasan dan kepentingan nasional Israel. Normalisasi hubungan diplomatik Israel dengan negara-negara Timur Tengah, terutama dengan Uni Emirat Arab dan Bahrain, memungkinkan kerjasama yang bermanfaat di beberapa bidang strategis.

Hubungan diplomatik merupakan hubungan yang melakukan pertukaran perantara atau perwakilan antara dua negara, dan secara tegas saling mengakui kedaulatan satu sama lain. Kata diplomatik berasal dari istilah *diploma*, dari bahasa Latin dan Yunani yang berarti surat kepercayaan. Selanjutnya dari istilah dasar ini berkembang menjadi istilah *diplomat*, *diplomasi*, dan *diplomatik*. (Syahmim, 2008)

Menurut Kamus Praktis Baru Webster, diplomasi didefinisikan sebagai seni dan praktik negosiasi yang efektif antara negara berdaulat dan negara berdaulat lainnya.. (Marriam-webster, 2022)

Diplomasi secara leksikal adalah kemampuan untuk bertransaksi satu sama lain tanpa menimbulkan perasaan yang tidak menyenangkan. Menurut Syahmin A.K., dikutip oleh Mohammad Alif Al-anshary dalam bukunya yang berjudul *Diplomasi*:

“Politik luar negeri dapat dibagi ke dalam dua kategori, yaitu keputusan dan pelaksanaan. Perumusan politik yang berkaitan dengan hubungan luar negeri dan pelaksanaannya termasuk dalam politik luar negeri.” (Syahmim, 2008 : 6)

Syahmin mengartikan politik luar negeri dalam hubungan luar negeri sebagai tindakan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan hubungan diplomatik suatu negara, dan bahwa diplomasi adalah tugas utama untuk melakukan hal-hal teknis secara benar dan efektif.

Dalam kamus KBBI, pengertian hubungan diplomatik ialah hubungan yang berdasarkan atas perantaraan perwakilan antara dua negara. Menurut Sir Ernest Satow dalam (Anshary, 2021 : 24) hubungan diplomatik diwujudkan sebagai cara untuk mengupayakan agar diterapkannya pengelolaan kecerdasan dan kebijaksanaan oleh diplomat sebagai utusan resmi suatu negara terhadap negara berdaulat lain, maupun terhadap aktor-aktor lainnya.

Ketika aktor antar negara dalam sebuah hubungan diplomatik memiliki banyak cara agar saling memberikan kesamaan dan manfaat dan tentunya berada dalam sebuah lingkaran dinamika diplomatik itu sendiri, yang sebelumnya tidak memiliki hubungan diplomatik, sampai memiliki hubungan diplomatik yang sangat erat dari segala lini agar terciptanya kerjasama untuk tujuan damai.

Makna penting diplomasi adalah pertukaran kegiatan antara diplomat yang mewakili negara yang bersangkutan, dengan maksud untuk memperjuangkan kepentingan nasional negaranya masing-masing. Selama proses ini, diskusi bervariasi karena tergantung pada kebutuhan dan tujuan pertemuan, yang akan menghasilkan kesepakatan yang mengikat, yang diratifikasi oleh masing-masing

negara. Para diplomat mencari tawar-menawar dalam proses negosiasi, sambil berfokus pada ekspresi non-konfrontatif dan berhati-hati dalam proses untuk mendapatkan keuntungan strategis seperti yang direncanakan dan untuk menemukan solusi taktik yang dapat diterima kedua belah pihak (Bakry, 2017 : 161)

Diplomasi adalah seni mendahulukan kepentingan nasional melalui upaya negosiasi dengan negara lain, melalui cara damai untuk mencapai tujuan tertentu, sehingga menciptakan Hubungan diplomatik untuk mempererat hubungan antara dua negara atau lebih, Hal ini kemudian dapat dikembangkan lebih lanjut dalam bentuk kemitraan saling menguntungkan, membangun aliansi, untuk tujuan damai dalam hal perang, atau untuk penaklukan tanpa adanya perang. Praktik hubungan diplomatik oleh mantan aktor negara sebelumnya dilakukan terus menerus dan sudah menjadi kebiasaan , tetapi karena ada perspektif yang berbeda tentang hubungan interpersonal hubungan diplomatik. Pada Konvensi Wina tahun 1961 tentang hubungan Diplomatik atau Konvensi Wina tentang Hubungan diplomatik. Di dalamnya ditetapkan seperangkat aturan yang terdiri dari 53 Pasal mengenai aspek-aspek penting dalam hubungan diplomatik, serta 2 Protokol mengenai masalah kewarganegaraan dan keharusan untuk menyelesaikan sengketa. (Syahmim, 2008 : 8)

Kemudian, pada tahun 1963, melalui Konvensi Wina tentang Hubungan Konsuler, protokol tambahan dibuat untuk melengkapi perwakilan diplomatik asing dan implementasi teknisnya, dan kemudian Konvensi New York tahun 1969 mengatur fungsi khusus hubungan diplomatik. Kedua konvensi ini bermuara pada

kodifikasi prinsip-prinsip hubungan diplomatik, yang berupa norma hukum yang mengikat, menjadi dasar untuk menjaga kearifan hubungan antarnegara dan digunakan sebagai acuan teknis dalam penyelenggaraan hubungan diplomatik beberapa negara. (Syahmim, 2008 : 9)

Untuk mencapai hubungan diplomatik dimulai dengan pengakuan, karena didasarkan pada prinsip formal timbal balik terhadap negara yang bersangkutan. tanpa pengakuan, pembukaan dan kelanjutan hubungan diplomatik tidak dapat berlangsung dan dikatakan sah. Setelah itu, kedua negara mengirim dan menerima perwakilan diplomatik mereka (pejabat yang berwenang). Salah satu negara bertindak sebagai negara pengirim dan negara lain sebagai negara penerima, baik pengirim maupun penerima perwakilan diplomatik satu sama lain. (Anshary, 2021 : 25-26)

Setelah menjalin hubungan diplomatik, negara-negara secara resmi membuka kantor diplomatik. Pembukaan kantor perwakilan diplomatik didasarkan atas kesepakatan bersama antara negara yang dengan itu negara penerima dan negara pengirim. Pembukaan perwakilan diplomatik merupakan wujud meyakinkan dari tindak lanjut hubungan diplomatik. Selain itu, hubungan luar negeri dapat melaksanakan kebijakan yang disepakati bersama secara adil dan tepat dalam pembukaan hubungan diplomatik oleh sebuah negara dengan negara lain merupakan salah satu modal sebuah negara untuk memiliki legasi di kanca internasional. Termasuk hak legasi untuk menempatkan perwakilannya, maupun menerima wakil-wakil dari negara lain. negara tidak memiliki kewajiban untuk menerima atau mengirim perwakilan terhadap negara lain karena masing-masing

negara memiliki hak dan legalitas. Kompromi adalah jalan pertama dalam memulai sebuah hubungan diplomatik untuk menghubungkan secara resmi negara penerima dan pengirim.

Legalitas untuk membuka hubungan diplomatik secara resmi digunakan untuk pengakuan kedaulatan hukum internasional tidak ada yang mewajibkan untuk tidak ada hukum internasional yang mewajibkan atau membuka hubungan diplomatik dengan menerima atau mengirim perwakilan negara dengan negara atau entitas yang belum atau tidak diakui kedaulatannya secara formal. (Syahmim, 2008 : 47) sebagai contoh, negara Indonesia yang tidak memiliki hubungan resmi secara diplomatik dengan Israel.

Bahkan untuk menjalin hubungan perdagangan harus melibatkan pihak ketiga baru bisa saja terjadi tanpa adanya pengakuan maupun hubungan diplomatik secara formal. Dalam pelaksanaan sebelum mencapai hubungan diplomatik, kedua negara saling mengakui terlebih dahulu. Pembukaan hubungan diplomatik atau pemulihan hubungan diplomatik, dapat juga terjadi pengakuan kedaulatan sekaligus pembukaan hubungan diplomatik seperti yang terjadi dalam perjanjian Abraham Accords. Misalnya, hubungan diplomatik Amerika dengan Israel saling mengakui kedaulatan dan merupakan sekutu abadi di kawasan Timur Tengah, bekerja sama untuk orientasi pasar bersama dan saling mendukung kepentingan nasional masing-masing. Amerika Serikat mendukung Israel dalam menyelesaikan konflik, di sisi lain, Israel mendukung penuh Rencana politik Amerika di kawasan Timur Tengah.

Dalam penelitian ini, setelah mengumumkan diri untuk menjadi sebuah negara berdaulat' Israel tidak memiliki hubungan secara resmi dengan tetangga-tetangganya di timur tengah, khususnya terhadap Uni Emirat Arab dan Bahrain walau sebelumnya antara Uni Emirat Arab dan Israel telah banyak melakukan kerja sama di berbagai bidang. Hubungan Resmi secara Diplomatik ini merupakan bentuk formalitas saja.

BAB III

LATAR BELAKANG KONFLIK ISRAEL - PALESTINA

A. Profil Palestina

Palestina ialah salah satu dari beberapa Negara di Timur Tengah yang terletak di antara Laut Tengah dan Sungai Jordan. Posisi Palestina di kanca internasional masih dalam perdebatan dikarenakan hanya segelintir negara anggota Liga Arab, *OKI*, *ASEAN* dan Gerakan Non-Blok yang mengakui Palestina, maka status Palestina di dunia internasional saat ini sedang ditentukan. Sekarang, wilayah Palestina terbelah menjadi 2 entitas politik yaitu Otoritas Palestina dan wilayah yang dikuasai oleh Israel.

Pada tanggal 15 November 1988, Otoritas Nasional Palestina atau Negara Palestina membuat pengumuman di kota Aljazair Aljazair. Kemudian memutuskan Republik Parlementer sebagai bentuk pemerintahannya. Jika mayoritas negara di dunia secara resmi mendeklarasikan kemerdekaannya setelah mendapatkan konsesi politik dari penjajah, Palestina melakukannya dengan menyatukan empat juta kelompok etnis di bawah payung negara Palestina. Yerusalem Timur (akan) ditetapkan sebagai ibu kota negara juga dinyatakan dalam pernyataan itu.

Secara *de jure*, Ketua Dewan Legislatif Palestina Aziz Duwaik dan Presiden Mahmoud Abbas dari faksi Fatah masih berselisih soal siapa yang akan menjabat sebagai kepala negara negara itu. Secara *de facto*, Hamas, yang dipimpin oleh mantan perdana menteri Ismail Haniyeh, bertanggung jawab atas Jalur Gaza, sementara Otoritas Palestina, yang dipimpin oleh Presiden Mahmoud

Abbas, hanya mengatur wilayah tepi barat. Pada tahun 2007, Hamas menduduki kekuasaan di wilayah Palestina. Ada 500 anggota Dewan Nasional Palestina, juga dikenal sebagai Parlemen Palestina, termasuk Komite Eksekutif, Persatuan Informasi, Institut Militer Palestina, Pusat Penelitian Palestina, dan Pusat Perencanaan Palestina. Komite Eksekutif membawahi Pendanaan Nasional Palestina, Organisasi Massa, Perwakilan PLO, Masalah Politik, Masalah Administrasi, dan Masalah Militer serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Para donator Timur Tengah, lembaga-lembaga Islam, dan individu-individu yang memahami penderitaan bangsa ini termasuk di antara sumber uang negara yang digunakan untuk mendanai pemerintahan. Israel, yang mengumpulkan pendapatan pajak, telah memberi Palestina sumber uang juga. tetapi karena Hamas memenangkan pemilihan, mereka dihentikan dengan persetujuan Amerika. Mereka khawatir bahwa hasilnya akan diinvestasikan dalam mengobarkan perang melawan Israel.(Garmabar : 2021 : 118–119)

Dalam internal Palestina ada beberapa faksi yang menguasai pemerintahan dan menguasai jalur Gaza. Di antara Faksi yang menguasai pemerintahan adalah PLO sebagai lembaga resmi perwakilan rakyat Palestina secara keseluruhan, di sisi lain ada Hamas sebagai penguasa tunggal jalur Gaza adapun Fatah yang berkuasa di Tepi Barat. Berikut merupakan profil dari Faksi dan pemerintahan yang ada di Palestina.

1. Faksi Politik di Palestina

Secara umum jika dilihat dari jauh perjuangan Palestina baik rakyat ataupun

faksi-faksi yang terlibat dalam melawan pendudukan Israel ditanahnya maka sekilas terlihat solid dan bersatu dalam menekan Israel, Namun pernyataan ini tidaklah begitu relevan dengan keadaan real di dalam pusaran internal Palestina itu sendiri, di dalam ada dua kubu yang saling bertolak belakang baik secara ideologi maupun pergerakan

- **Hamas**

Hamas didirikan sebagai protes terhadap frustrasi orang-orang Palestina tertentu dengan upaya diplomatik yang dilakukan oleh Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) dan mantan Fatah pimpinan Yasser Arafat. Seruan Sheikh Ahmad Yasin kepada rakyat Palestina untuk bersatu melawan pasukan Israel pada 14 Desember 1987 di Gaza, bagaimanapun, tidak menandai awal resmi Hamas. Namun, gerakan ini dimulai di Palestina pada tahun 1930-an oleh Ikhwanul Muslimin (IM), yang akhirnya dititiskan kepada Hamas. (Khumairoh & Fadhil, 2019)

Struktur organisasi Hamas didasarkan pada tarbiyah, dan memiliki lembaga pelaksana (Maqtab Qiyadi) yang melaksanakan inisiatif lapangan. Badan ini diatur dalam tiga divisi: keamanan, militer, dan politik. Tugas divisi keamanan adalah memperoleh data tentang telejen Israel, divisi militer mengorganisir pasukan besar dan menyerang Israel, dan tugas divisi politik adalah mengeluarkan pernyataan, menerbitkan materi, dan menangani berbagai masalah politik. Hamas menerima filosofi Islam Ikhwanul Muslimin (IM), yang didirikan di Mesir pada tahun 1928 dan meneruskan ideologinya kepada Hamas. Hamas mengingankan ideolgi Islam ini dapat di terapkan dalam pemerintahan Palestina agar sesuai

dengan Prinsip Islam.

Motif Islami yang digunakan pada logo HAMAS juga mencerminkan manhaj Islam. Untuk mengembangkan pemberontakan dalam negeri, HAMAS bekerja untuk mempertahankan kontak dengan Harakah dan kelompok pembebasan Palestina lainnya sambil juga berusaha untuk menggalang dukungan luas. HAMAS melakukan hal-hal berikut untuk mendukung basis massa, antara lain:

Hamas aktif menggalakan aksi-aksi solidaritas social kemasyarakatan untuk meningkatkan kesatuan dan saling menolong dalam masyarakat. (Pasal 20 dan 21) Hamas secara aktif mempromosikan tindakan solidaritas sosial untuk mendorong harmoni dan kerjasama dalam masyarakat. Studi secara umum dan proses Tarbiyah yang sedang berlangsung dengan sistem sel yang digunakan terus meningkatkan dukungan untuk HAMAS. Organisasi profesional, artistik, pendidikan, dan atletik yang dibuat dan sebagian besar dikendalikan oleh Hamas bergabung dengan upaya distribusi dan menarik anggota baru melalui penggunaan bahasa yang menarik hati. (sagala, 2005) Cara-cara inilah yang kemudian sukses mengantarkan Hamas melakukan perlawanan sipil diberbagai aksi (*intifadah*).

- **Fatah**

Diaspora Palestina di Kuwait menciptakan Fatah, yang merupakan singkatan dari Harakat al-Tahrir al-Filistiniya (Organisasi pembebasan Palestina), pada akhir 1950-an. Fatah artinya penaklukan dalam bahasa Arab. (Folia, 2017) Kelompok pertama yang muncul dari lingkaran Arab-Muslim Palestina adalah Fatah. Pemuda Palestina yang berada di luar negeri-negeri Timur Tengah

berkeinginan untuk berjuang melalui organisasi-organisasi dalam perjuangan untuk membebaskan Palestina dari Israel. Filosofi Fatah benar-benar sesuai dengan Marxisme, yang telah mengasimilasi tujuannya dalam revolusi Aljazair. Pertama kali didirikan di Kuwait pada tahun 1957, Harakah Tahrir Filistin kemudian berubah nama menjadi Harakah at-Tahrir al-Wathani al-Filisthini. Yasser Arafat adalah salah satu pemimpin Fatah yang terkenal. Sebagai kekuatan politik yang kuat di Palestina, Arafat mendirikan Fatah. Di bawah Yasser Arafat, Fatah lebih memilih jalan yang mudah dan terlibat dalam negosiasi dengan Israel. Pada awal 1990-an, ia berhasil menjadi presiden Palestina. Arafat akhirnya mengakui Israel sebagai negara setelah saluran diplomatik dan negosiasi yang ekstensif. PBB. Saat ini, Fatah secara efektif menguasai Tepi Barat (Hidayatullah, 2022)

Strategi Hamas bertentangan langsung dengan filosofi Partai Politik Fatah, yang mengutamakan diplomasi di meja perundingan dengan Israel dan meminimalkan gencatan senjata. Menurut Auguste Comte, modernisasi mungkin menjadi penyebab sekularisme, yang sering dipahami sebagai ideologi yang menentang ritual sakral yang bersumber dari agama atau politik yang melibatkan agama atau elemen lain. (Rahman, 2020, p. 87). Karena pemahaman ideologi sekular inilah yang membuat ideologi Islam tidak bisa menerima konsep sekular.

- **PLO (Palestinian Liberation Organisation)**

Otoritas Nasional Palestina atau Otoritas Palestina adalah nama badan perwakilan rakyat Palestina yang dikenal dengan PLO (*Palestinian Liberation Organization*). Liga Arab mendirikan PLO pada tahun 1964 sebagai tanggapan

atas bangkitnya radikalisme militan terhadap Israel. (Folia, 2017)

Seiring perkembangan waktu PLO mengemban perang penting dan lebih luas untuk mewakili otoritas Nasional Palestina. Pertemuan pertama PLO terjadi di Yerusalem pada 28 Mei 1964. Di hadiri oleh 442 tokoh palestina untuk memilih pemimpin, dan pada akhirnya di tetapkan ahmed suqeiri sebagai pemimpin pertama PLO. Selain mewakili otoritas nasional palestina PLO menjadi payung untuk berbagai faksi di palestina dan memiliki peran sentral dalam menggalang dukungan dan mobilisasi di kanca internasional. Setelah kemelut terjadi atas pergantian pemimpin maka pada 1969 Yaser Arafat maju menjadi pemimpin PLO. Hingga pada puncaknya 14 Oktober 1974, Majelis umum PBB memberikan pengakuan bahwa PLO sebagai satu-satunya wakil sah rakyat palestina. (Saptoyo, 2021)

Disisi lain kemelut antara perbedaan ideology antara PLO dan Hamas menjadi akar konflik dan perselisihan dalam internal palestina, Pendukung Hamas berasal dari kalangan konservatif, Rakyat Palestina yang memandang nasionalisme sekuler yang diusung PLO tidak sesuai dengan agama Islam dan rawan korupsi, materialisme, bahkan kerusakan internal PLO. Pendukung Gerakan Islam menolak orientasi politik dan kebijakan luar negeri PLO yang tidak memasukkan Islam, menyebabkan kelompok Muslim menyatakan ketidaksetujuan atas pembentukan negara Palestina sekuler di bawah kendali PLO.(Fuhaidah, 2012, hal. 127–128)

- **Otoritas Palestina (*palestinian Authority*)**

Otoritas Palestina adalah pemerintahan semi-otonom yang mengurus Palestina, meski pada pelaksanaannya hanya terjadi di Tepi Barat. PA singkatan Otoritas Palestina pertama kali didirikan pada tahun 1993 melalui kesepakatan Oslo yaitu serangkaian kesepakatan yang dibuat antara organisasi pembebas palestina dan Israel. Selain itu PA mengambil tanggung jawab administrative dan keamanan parsial atas daerah-daerah di Tepi Barat dan Jalur Gaza. (IMEU, 2005 diakses pada 14/08/2022)

Saat ini menjabat sebagai presiden PA dan kepala delegasi Palestina di pertemuan internasional besar adalah Mahmoud Abbas. Dengan kata lain, Abbas sedang bernegosiasi atas nama Palestina dengan negara lain. Terlepas dari kenyataan bahwa kedua organisasi memiliki tujuan yang sama—pembentukan negara Palestina dengan kemerdekaan dan kedaulatan—hubungan antara PA dan Hamas tidak terlalu ramah. Namun para pemimpin di dalam PA adalah orang yang memegang kekuasaan di dalam PLO sedangkan PLO di dominasi oleh faksi Al-fatah yang ideologinya bertolak belakang dengan Hamas. Karena Fatah ingin menjalin hubungan kerja dengan Israel, maka Hamas melihat ini merupakan bentuk penghianatan mereka terhadap rakyat Palestina. Karena kekhawatiran akan pembalasan Israel, Fatah, atau dalam hal ini Mahmmoud Abbas, tidak langsung menuruti permintaan Hamas. (Folia, 2017)

Kondisi yang terjajah seperti itulah menyebabkan lahirnya gerakan sosial di berbagai lapisan rakyat Palestina sebagai bentuk perlawanan dan penolakan atas hadirnya Israel di tanah mereka. Fatah dan Hamas lahir dari kondisi penjajahan, padahal sebelumnya sudah ada gerakan perlawanan seperti PLO. Namun, fondasi

posisi Fatah dan Hamas adalah berbagai jenis perjuangan sebelumnya. Dua kekuatan politik utama di Palestina, dua kelompok perlawanan, semuanya aktif terlibat dalam perjuangan melawan Israel. Tujuan bersama mereka adalah untuk membebaskan Palestina dari perlawanan Israel.(Rahman, 2020). Namun dalam konteks Normalisasi hubungan Uni Emirat Arab, Bahrain terhadap Israel, Semua Faksi-faksi ini kompak khususnya antara Fatah dan Hamas menyuarakan penolakan dan kecaman terhadap kebijakan terbaru kedua negara arab dengan Musuhnya Israel.

B. Profil Zionis Israel

Zionisme adalah ideologi resmi dari negara Israel. Zionisme yang menjadi penggerak Yahudi di dalam dan di luar Israel. Zionisme sebagai sebuah gerakan politik bertugas untuk menguasai semua organisasi Yahudi yang ada di luar Israel di manapun di dunia ini, sedang Israel sebagai negara bertugas menjadi pengawas organisasi Yahudi apapun yang ada dalam Israel. Zionisme dan Israel masing-masing saling kuat menguatkan dan saling membutuhkan. Zionisme adalah suatu gerakan yang memperlatah Yahudi dalam segenap bidang untuk menguasai Timur Tengah yang strategis itu. Upaya-upaya yang dilakukan gerakan Zionisme dalam menguasai kawasan strategis tersebut begitu banyak memengaruhi situasi politik regional yang sedang berlangsung.(Hidayat : 2021)

Tujuan awal Zionisme internasional adalah ketika ambisi Yahudi untuk dapat menempati Tanah Palestina mendapat penentangan dari Dinasti Turki Utsmani waktu itu sebagai penguasa wilayah Palestina. Sampai pada akhirnya

muncul seorang Yahudi bernama Theodore Herzl yang memainkan peran besar di kanca politik internasional demi tegaknya negara Yahudi di tanah Palestina. Sejarah organisasi zionis internasional bermula pada saat Daulah Utsmaniyah mengalami kekalahan saat berhadapan dengan Yunani pada tahun 1897 M, dalam kondisi kekalahan dalam perang tersebut Herzl mengumpulkan jutaan Yahudi Eropa untuk menemui duta Utsmaniyah di Wina. Ia menawarkan bantuan besar Yahudi kepada Sultan Abdul Hamid, dengan syarat ia harus mengizinkan Yahudi bermigrasi ke Palestina. Mendengar pernyataan tersebut Sultan Abdul Hamid menolak tawaran Herzl dan jutaan Yahudi Eropa lainnya. (As-Suwaidan, 2017, hal. 290)

Herzl menyadari mustahil untuk dapat memasuki Palestina selama Sultan Abdul Hamid masih ada. Akhirnya ia mengadakan konferensi Zionis pertama di kota Basel, Swiss, dipimpin Herzl secara langsung. Dalam konferensi ini ia mendirikan organisasi Zionis Internasional. Dengan organisasi Zionis ini, dalam Konferensi tersebut mengeluarkan keputusan bahwa Yahudi tidak memiliki tanah air selain Palestina, bukan Argentina ataupun yang lain termasuk hasil keputusan penting lainnya adalah ketika Sultan Abdul Hamid tetap bersikeras menolak tuntutan-tuntutan Zionis, maka Yahudi akan menghancurkan Daulah Utsmaniyah. (As-Suwaidan, 2017, hal. 291)

Awal Zionis Internasional menguasai tanah Palestina ketika Aliansi Utsmani dengan Jerman selama Perang Dunia I. Inggris terkejut dan meminta bantuan kepada orang-orang Yahudi, meminta mereka untuk membayarnya. Pada tanggal 2 November 1917, Inggris membuat Deklarasi Balfour, berjanji untuk

memberikan wilayah itu kepada orang-orang Yahudi Palestina. Menurut peraturan Liga Bangsa-Bangsa, jika suatu negara memenangkan perang, ia memiliki hak sementara untuk mendominasi tanah apa pun yang telah direbutnya untuk sementara. Dalam hal ini, wilayah itu ditaklukkan oleh Inggris. Yahudi. Inggris menolak permintaan orang-orang Arab Palestina saat itu karena mereka ingin melaksanakan ketentuan Deklarasi Balfour, meskipun orang-orang Arab Palestina telah meminta untuk mengendalikan masa depan mereka sendiri.. (Nurjannah & Fakhruddin : 2019)

Hingga pada akhirnya Zionis Internasional berhasil berimigrasi dari penjuru dunia dan menduduki wilayah Palestina, tepat pada tahun 14 Mei 1948 negara yang di perjuangkan Organisasi Zionis Internasional berhasil tegak berdiri sebagai negara yang bernama Israel, rumah bagi orang-orang Yahudi. Perdana menteri pertama Israel adalah David Ben Gurion serta Caim Weizman sebagai presiden. enam belas menit setelah negara Israel diumumkan di Tel-Aviv presiden Amerika Serikat Truman langsung memberikan pengakuan diplomatik penuh kepada Israel dan mendukung berdirinya negar Israel tersebut. Langkah lain juga diikuti oleh Uni Soviet. Melihat kenyataan hal tersebut pengaruh dan gerakan Zionis atas negara-negara besar khususnya di senat PBB, mengakibatkan kedudukan negara Israel dalam percaturan politik internasional semakin memperoleh pengakuan dan kedudukan. (Burhanudin : 2006 : 18–19)

C. Latar Belakang Konflik

Sejak tahun 1516 Sampai Perang Dunia 1 satu, Palestina dan seluruh kawasan Timur Tengah berada di bawah kekuasaan Turki atau ke kaisaran utsmaniyah (

Ottoman Empire) bulan Agustus 1987 dilangsungkan kongres internasional di Basel yang mengeluarkan sebuah Deklarasi yang isinya “tujuan nasional untuk mewujudkan sebuah negara Yahudi di Palestina” Setelah berakhir Perang Dunia 1, Turki yang memihak Jerman juga menderita kekalahan dan Terusir dari Timur Tengah beberapa bagian Timur Tengah jatuh ke tangan Inggris dan beberapa bagian jatuh ke tangan Perancis Palestina jatuh ke tangan Inggris atas keputusan Liga bangsa-bangsa pada tahun 1923 Palestina menjadi daerah mandat Inggris pada waktu berlangsungnya perang dunia pertama, tahun 1916 Inggris dan Perancis telah mengadakan persetujuan untuk membagi bagi dunia Arab persetujuan itu terkenal dengan nama Balfour Agreement. tahun 1917 Inggris mengeluarkan suatu keputusan yang terkenal dengan nama Balfour Declaration yang menjanjikan sebuah negara bagi orang Yahudi di Palestina. Pada tahun 1919 orang Yahudi di Palestina hanya berjumlah kurang lebih 58.000 Orang, pada tahun 1936 orang Yahudi telah berjumlah 348000 orang. orang-orang Yahudi segera pula Membeli dan merampas tanah di Palestina dari orang-orang Arab baik itu secara paksa ataupun ilegal. selama pemerintahan Ottoman Empire orang Yahudi tidak dibolehkan Membeli tanah di Palestina. (Riza, 1992, hal. 117)

Tanggal 14 Mei 1948 Israel memproklamasikan kemerdekaannya pada pukul 18.01. 10 menit kemudian yaitu pada pukul 18. 11, Amerika Serikat mengakui Israel yang kemudian disusul oleh Inggris Perancis dan Uni Soviet. telah terjadi sebanyak 3 kali perang besar antara negara-negara Arab dengan Israel, yaitu pada Tahun 1948 tahun 1967 dan tahun 1973 dalam

setiap orang tersebut Israel selalu dibantu oleh Amerika Serikat dan beberapa negara barat lainnya disamping itu telah terjadi pula perang pada tahu waktu Mesir Menasionalisas terusan Suez pada tahun 1956, maka Inggris, Perancis dan Israel menyerbu Mesir pada tahun 1982 Israel Lebanon dalam usaha menghancurkan basis PBNU dan akhirnya Israel menduduki Lebanon Selatan. , Setiap orang negara-negara Arab dan Israel, negara-negara Arab selalu menderita kekalahan. Dalam perang tahun 1967 seluruh daerah Palestina, yaitu west bank, termasuk Yerusalem Timur dan Gaza, diduduki Israel. bahkan juga Sinai (daerah Mesir) dan dataran tinggi Golan(daerah Syria) jatuh ke tangan Israel. (Riza, 1992, hal. 118)

Deklrasi Balfour menimbulkan banyak imigrasi besar-besaran Yahudi masuk ke tanah Palestina, inilah menjadi akar konflik yang membuat rakyat Palestina geram terhadap kehadiran Yahudi di tanahnya, hingga membuat negara-negara Arab disekitar murka dan menimbulkan eskalasi konflik hingga hari ini.

D. Negara Barat yang Memiliki Kepentingan di Palestina dan Timur Tengah

Kawasan timur tengah merupakan kawasan yang sangat strategis Namun fakta terkait hal itu tidaklah membawa kawasan ini menuju suatu kondisi yang diinginkan bersama. Baik oleh masyarakat Timur Tengah pada khususnya dan masyarakat internasional pada umumnya. Hal tersebut disebabkan antara lain adanya perbenturan berbagai kepentingan yang tidak pernah sampai pada proses penyelesaian yang diinginkan oleh masing-masing pihak, hal ini setidaknya mewarnai situasi politik di wilayah tersebut. Salah satu hal utama yang

memengaruhi percaturan politik di wilayah timur tengah ini adalah gerakan zionis yang sedang dimainkan oleh Negara Israel. Dapat dikatakan bahwa Zionis Israel adalah sumber malapetaka bagi keberlangsungan kehidupan politik di Timur Tengah yang tidak stabil.(Hidayat, 2021, hal. 54)

Selain pengaruh Zionis Israel yang menyebabkan ketidak stabilan politik di Timur Tengah Adapun pandangan dari Dr M din syamsudin dalam (Sihbudi, 2007) menurutnya *“Bagi Negara-Negara yang berasaskan islam maupun berpenduduk mayoritas islam, mereka bersatu sekadar untuk menegaskan bahwa kemelut AS dan iran sama sekali tidak mempresentasikan gejolak kebetulan belaka, yakni mereka dipersatukan dalam sebuah isu oleh pihak tertentu. Disertai dengan kesadaran dan penghayatan yang kukuh bahwa mereka adalah satu.”*

Jika berbicara kepentingan barat dan Hegemoninya di Timur tengah khususnya dalam konflik Palestina dan Israel, Jelas Amerika Serikat sebagai negara adidaya memiliki peran yang besar dikawasa ini. Ketakutan akan kelompok-kelompok Ekstrimis yang kembali akan mengancam kedaulatan dan mengulangi sejarah kalam AS pada tragedy WTC membuat AS memperketat dimana sebab pemikiran ini berakar dan kelompok ini berkembang, Timur tengah dinilai AS sebagai ladangnya kelompok-kelompok ekstrimis lahir dan menjarakan pengaruhnya ke seluruh dunia. Ketakutan akan kelompok ini merambah hingga ke publik AS jika suatu saat Terorisme Internasional akan bangkit dan menggunakan kekuatan penghancur seperti Nuklir. Terlebih jika kelompok-kelompok ini merusak dan menjadi penghalang bagi kepentingan AS di Timur tengah, Namun yang paling ditakuti oleh Amerika adalah serangan oleh

militan islam terhadap stabilitas dan keamanan negara-negara penghasil minyak di Teluk Persia serta terhadap Proses perdamaian Arab-Israel, ini merupakan dua pondasi utama AS tetap bercokol di kawasan ini. (Gerges : 2006 : 12-13)

Kepentingan negara-negara besar yang ikut mewarnai konstelasi konflik di wilayah ini menjadi sangat jelas, Fakta paling terang atas keterlibatan negara-negara besar pada saat konflik di Suriah, keterlibatan Rusia dan Amerika sebagai hegemon dan actor luar yang signifikan memainkan peran di situ. Adapun negara lain yang turut mewarnai perang di suriah diantaranya Uni eropa yang tergabung dalam NATO, Arab Saudi, Iran, dan Turki. kubu pendukung pemberontak yang keras menolak pemerintahan Bashar Al-Assad di komandoi oleh Amerika Serikat dan Arab Saudi sedangkan dibalik kuatnya pemerintahan Assad ada Rusia dan Iran. (Deovanka & Zulian, 2018)

Di lain sisi perseteruan negara-negara di Timur Tengah khususnya negara Arab teluk dengan Iran kian hari kian meningkat, perang proxy antara arab Saudi dengan Iran di beberapa wilayah di kawasan menjadikan Timur Tengah semakin rumit jika untuk mencapai stabilitas kawasan. Belum lagi banyaknya kepentingan dan intervensi asing di wilayah ini dan jejak berdarah hegemoni Amerika Serikat yang nampak jelas hingga hari ini. Contohnya saja lahirnya revolusi Iran dan kehadiran sosok saddam husein membuat perubahan besar pada pusran konflik Timur Tengah, kala itu Amerika Serikat mengambil kendali menginvasi dan melancarkan serangan terhadap Iraq pada (1990-1991) dan kemudian menjatuhkan kekuasaan saddam Hussein dan sampai pada puncaknya berlanjut dalam memonopoli proses perdamaian Arab-israel. (Sihbudi, 2007, hal. 131)

Pada konteks ini kehadiran Israel dan kuatnya hegemoni Amerika Serikat di kawasan ini semakin memperlihatkan jati diri bangsa Arab sebagai bangsa yang terhormat dan bermartabat karena adanya nilai religious Islam yang selalu melekat pada diri negara Arab, jati diri itu ditunjukkan pada cara pandang mereka dalam melihat dan melindungi palestina dari kependudukan Israel, dan pengaruh amerika. Namun pada akhirnya hanya kepentinganlah menjadikan beberapa Negara Arab berjabat tangan dengan Israel dengan alasan penting ialah kepentingan negara dan keamanan. Namun di satu sisi kampanye demokratisasi Timur Tengah oleh Barat seakan melemah ketika negara-negara Barat seakan membiarkan rezim otoriter di negara Muslim menekan kekuatan-kekuatan Islam dan menimbulkan spekulasi seberapa serius barat mendukung Demokratisasi ini. Pada konteks Palestina ketika Hamas sebagai salah satu gerakan yang menentang eksistensi Israel memenangkan Pemilu pada 2006, Negara-negara Barat yang dipimpin AS akan mengakui HAMAS sebagai pemenang pemilu jika HAMAS mau meletakkan senjata, tidak menggunakan cara-cara kekerasan dan pemberontakan, mulai mengakui Israel dan legowo menerima semua kesepakatan yang telah dicapai dalam setiap perundingan antara Israel dan otoritas Palestina. Namun hal itu tidaklah sejalan dengan keinginan AS, Israel dan kawan kawan baratnya akhirnya HAMAS menolak syarat-syarat tersebut, akibatnya gerakan ini dan rakyat Palestina diisolasi dari pergaulan internasional. Bantuan-bantuan dari luar (Barat) yang selama ini didapatkan rakyat Palestina dihentikan. Kemudian pajak yang dibayarkan oleh Rakyat Palestina kepada Israel dan semestinya di

kembalikan lagi kepada rakyat palestina juga dihentikan, dan asset-asset milik HAMAS dibekukan. (Muttaqien : 2017 : 272)

Arab spring pada 2011 menjadi panggung utama negara-negara barat dalam melancarkan kampanye demokrasinya di Timur Tengah, banyak yang mengatakan bahwa kolonialisme modern barat yang dipimpin Amerika, Prancis dan Inggris adalah dengan cara menjunjung tinggi hak asasi manusia mengintervensi setiap pemimpin negara yang dikenal dictator dan menginvasinya dengan serangan militer. Gelombang revolusi yang terjadi di Tunisia, Libya, Mesir, dan Yaman tidaklah lebih parah seperti yang terjadi secara langsung di Iraq dan Afghanistan. (Zada : 2016 : 70)

Di Libya misalnya kejatuhan khadafi murni merupakan intervensi negara luar dan militer asing, kendati rakyat Libya termotivasi oleh dua gelombang gerakan yang terjadi di Tunisia dan Mesir yang semangkin membuat situasi di dalam Libya seberkecamuk demi untuk melancarkan transisi politik. Sayangnya, kekuatan militer asing bukan rakyat Libya sendiri menentukan arah transformasi politik yang terjadi di negara itu. Hasilnya menunjukkan adanya kepentingan politik dan komersial. budaya dan kedaulatan peradaban sebagai jati diri bangsa juga ikut direnggut, sehingga dua tujuan ini tidak cukup. Sebagai tanggapan, rakyat Libya akan tunduk dan mendukung tujuan Barat di tempat-tempat seperti Afghanistan dan Irak. Inilah yang menimbulkan kekhawatiran masuknya campur tangan barat diwilayah Timur Tengah dan dunia Islam pada khususnya. (Zada : 2016 : 71)

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL

A. Dampak Normalisasi bagi Palestina dan Israel

1. Bagi Palestina secara langsung

Dampak yang ditimbulkan dari Normalisasi ini akan terus berjalan namun penulis menemukan ada beberapa dampak yang timbul secara langsung pasca Normalisasi tersebut khususnya terhadap Palestina yang terbagi dalam dua dampak secara geopolitik dan ekonomi

- **Penarikan Kedutaan Besar Palestina Dari Uni Emirat dan Bahrain**

Merespon atas perjanjian Normalisasi perdamaian dengan Israel, Palestina menarik Duta besarnya dari Uni Emirat Arab dan Bahrain, menteri luar negeri Palestina Riyad al-maliki mengatakan "*atas permintaan presiden Mahmmoud abbas*". Selain itu semua Faksi organisasi maupun faksi politik bersatu dan mengemukakan keras kesepakatan Normalisasi itu termasuk organisasi yang menguasai jalur Gaza (Hamas) ketua Hamas Ismail Haniyeh melakukan pembicaraan secara langsung dengan Residen Mahmmoud setelah kesepakatan Normalisasi tersebut. Hamas memang menentang dengan keras kesepakatan Normalisasi tersebut, (Permana : 2020)

Pemerintah Palestina atau PA (Palestinian Authority) mengatakan Normalisasi itu merupakan bentuk pengkhianatan bagi perjuangan bangsa palestina termasuk klaim mereka atas Yerusalem sebagai ibukota Israel Menurut Ahmad Majdalani, anggota Komite Eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina,

"Ini adalah hari hitam dalam sejarah Palestina. Konsensus Arab berbeda secara signifikan dari kesepakatan ini. Tidak ada yang diizinkan untuk membuat konsesi kepada Israel dengan imbalan apa pun dengan orang-orang Palestina".(Aditya : 2020)

Demikian dengan Bahrain, Pemerintah Palestina menarik dubesnya dari Bahrain, menurut Hanan Ashrawi anggota Komite Pembebasan Palestina

“AS telah menggunakan semua kekuatan politik dan ekonominya guna memeras, menekan, serta menggertak Arab dan negara-negara lain untuk menormalisasi penjajahan Israel. Secara diam-diam AS pun memberikan dukungan terhadap kejahatan perang aneksasi yang dilakukan Israel. Ashrawi berpendapat Washington telah menginjak-injak prinsip-prinsip dasar hukum internasional”.

Juru bicara Hamas Hazem Qassem dalam sebuah pernyataan mengatakan *“Perjanjian itu sama sekali tidak melayani kepentingan Palestina sedikitpun, melainkan melayani Narasi Zionis, perjanjian ini mendorong pendudukan (oleh Israel) untuk melanjutkan penyangkalan terhadap hak-hak rakyat Palestina dan bahkan melanjutkan kejahatannya terhadap rakyat kami”* (Mahmud, 2020)

Kecaman mengalir dari dalam setiap Faksi-Faksi yang ada di Palestina, baik ketua maupun juru bicara setiap faksi ternyata sepakat menolak dan mengecam atas adanya normalisasi itu, dan pada akhirnya melalui otoritas Palestina yang dipimpin Presiden Mahmoud Abbas menarik kedutaan Palestina dari kedua negara UEA dan Bahrain. Sebagai bentuk protes dan tindakan atas normalisasi Diplomatik secara Resmi tersebut. Kewenangan yang di ambil oleh Presiden

Otoritas Palestina Mahmoud Abbas untuk menarik kedutaan besarnya dari kedua negara Arab tersebut masuk dalam kategori (*Das Staatsregiment*) atau Krato Politics yaitu kewenangan Pemerintah (*Arthopolitik*).

- **Berhentinya Upaya Aneksasi di Tepi barat**

Meruntut dari upaya Normalisasi UEA, Bahrain terhadap Israel yang dilandasi atas dasar kepentingan nasionalnya. Namun disisi lain adanya sinyal yang mengarah pada keuntungan bagi Palestina itu sendiri, dengan adanya Upaya berhentinya aneksasi di tepi barat.

Sebelumnya pada September 2019, perdana menteri Israel Benjamin Netanyahu melontarkan janji pada kampanye pemilihan umumnya ia mengatakan “Dengan bantuan Tuhan, kami akan memperluas kedaulatan negara Yahudi ke semua permukiman untuk menjadi bagian dari Israel”. Janji ini ia katakan saat menghadiri upacara pembukaan tahun ajaran baru di pemukiman elkana di tepi barat. Dalam laporan BBC Israel mengatakan bahwa keinginan untuk mencaplok tepi barat merupakan sebuah langkah historis dari nilai religius leluhur orang-orang Yahudi. Israel pula mengatakan kehadirannya di wilayah tersebut khususnya di Lembah Yordan, merupakan hal penting demi pertahanan negaranya.(Cindyara : 2020)

Sejak konflik Timur Tengah tahun 1967, Israel telah menduduki Tepi Barat secara keseluruhan. Sebelum serangan 6 hari Israel di wilayah berpenduduknya sendiri, batas yang ditetapkan selama gencatan senjata pada tahun 1967—dikenal sebagai garis hijau 1967—ada di sana. Palestina, termasuk di Yerusalem Timur, Gaza, dan Tepi Barat. Wilayah Tepi Barat adalah rumah

bagi hingga tiga juta orang Palestina, sementara 430.000 orang Israel juga tinggal di sana di 132 pemukiman yang didirikan di sana selama kendali Israel. (Cindyara : 2020)

Di bawah perjanjian Normalisasi ini Keinginan UEA untuk dapat membantu menyelesaikan masalah Palestina kian jelas ketika syarat perjanjian Abraham accord antara UEA, Bahrain dan Israel memperjelas adanya indikasi penghentian atau melemahnya Rencana Aneksasi Tepi barat, Seperti yang di katakan syeikh Mohammad Bin Zayed Al-Nahyan putra mahkota Abu Dhabi juga sekaligus Emir Uni Emirat Arab Beliau mengatakan dalam cuitan Twiternya pada Kamis 13 Agustus 2020 "*Selama pertemuan dengan Presiden Trump dan Perdana Menteri Netanyahu, kesepakatan dicapai untuk menghentikan aneksasi Israel lebih lanjut atas wilayah Palestina,*" (CNNIndonesia.com : 2020)

Liga Arab pun memberikan keoptimisan pada Palestina dan masyarakat Arab pada umumnya, melalui ketua Liga Arab Aboel Geith mengatakan bahwa "*Kesepakatan itu pasti mencegah pencaplokan atas tanah Palestina dan Saya sepenuhnya memahami keprihatinan Palestina tetapi, di sisi lain, saya secara pribadi telah berfokus pada poin yang sangat spesifik, bahwa Uni Emirat Arab dan AS mencapai pemahaman yang ditekankan untuk pihak Israel menanggukkan aneksasi*"

Namun setelah sekarang di bekukan, itu tidak akan di aktifkan kembali. Ia kembali menegaskan bahwa tanpa adanya normalisasi antara UEA dan Israel. Israel akan mengumumkan aneksasi di Tepi barat sehari setelah pemilihan presiden AS Donald Trump pada 03 November 2020, jika presiden Trump terpilih

kembali. Aboel Geith menegaskan bahwa ia mengatakan itu dengan tingkat kepastian besar. (Sicca : 2020)

Sebetulnya apabila dilihat dari pernyataan putera mahkota Uni Emirat Arab dan ketua liga Arab bahwa upaya Normalisasi ini akan menghentikan pencaplokan dan aneksasi Israel di tepi barat, sudah dapat memberi harapan dan keamanan bagi warga Palestina di tepi barat, Namun bagaimanapun ambisi perdana menteri Israel waktu itu Benjamin Netanyahu untuk melakukan pencaplokan di Tepi barat merupakan bagian dari tujuannya saat kampanye, kendati begitu PM Israel harus tetap mematuhi setiap inti dari kesepakatnya pada perjanjian normalisasi tersebut. Berhentinya upaya Aneksasi Pasca Normalisasi ini sebagai bentuk keputusan terhadap batas-batas wilayah Palestina, hal tersebut masuk dalam Kategori Negara *Das Reich* yaitu *Physiopolitik* (Wilayah).

- **Uni Emirat Arab Dan Bahrain Pangkas Bantuan Dana Ke Palestina**

Konflik antara Israel dan Palestina yang berkepanjangan menyebabkan palestina kian hari makin terpuruk, tidak hanya dari sisi wilayah saja yang semakin mengecil dan hanya menyisahkan tepi barat dan jalur Gaza, Namun kerusakan bangunan tempat tinggal rakyat Palestina hingga perekonomian mereka menjadi tidak stabil akibat konflik yang memakan waktu puluhan tahun, dari sisi perekonomian 80% ekspor Palestina mayoritas di sumbang oleh Israel. Ekonomi Palestina kemudian diperkirakan akan menyusut setidaknya 7,6 persen pada tahun 2020. Jika Israel terus memperoleh wilayahnya di Tepi Barat, Palestina bisa lebih menderita. Belum lagi pandemi COVID-19 yang menghambat pertumbuhan ekonomi Palestina. Bahkan, sebuah penelitian Bank Dunia mengklaim bahwa

sebelum virus corona tiba, lebih dari 25% warga Palestina dianggap hidup dalam kemiskinan. Setelah epidemi, peningkatan yang signifikan dalam jumlah orang miskin diantisipasi, termasuk peningkatan 30% di Tepi Barat dan 64% di Jalur Gaza.

Menjalankan roda sosial dan perekonomian di bawah Aneksasi Israel, jelas membuat Palestina yang secara praktis mengandalkan bantuan internasional, bantuan inilah yang tetap membuat berputarnya roda perekonomian Palestina. Selain itu, orang-orang Palestina juga bergantung pada pekerjaan di industri konstruksi, yang sebenarnya sebagian besar dipegang oleh perusahaan-perusahaan Israel, serta pada lahan industri dan pertanian yang digunakan untuk perkebunan dan pertanian. (Idris : 2020)

Sikap Palestina tegas dalam merespon kebijakan Normalisasi tersebut. Namun hal lain yang menjadi konsekuensi akibat dari Normalisasi tersebut adalah bahwa Uni Emirat Arab memangkas dana bantuan ke Palestina sebesar 51,7 Juta dollar AS atau sekitar (Rp 726,7 Miliar) pada 2020. Media Al Jazeera mengatakan bahwa Uni Emirat Arab menyumbangkan 51,8 Juta dollar AS (Rp 728,2 Milliar) untuk UNRWA (*The United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East*) pada 2018 dan 2019. Namun Uni Emirat Arab hanya mengalokasikan bantuan sebesar 1 juta dollar AS atau sekitar (Rp 14,057 Milliar). (Aljazeera.com : 2021)

Secara rinci pemangkasan dana bantuan sangat drastic tersebut dapat di hitung sejak tahun 2018 UEA menyumbang sekitar 53 juta dollar AS, pada tahun

2019 sekitar 51 juta dollar AS, dan pada tahun 2020 UEA memberi kepada UNRWA hanya sebesar 1 juta dollar AS. (Toi : 2021)

Dari pengurangan dana bantuan tersebut menjadi efek dan akibat pasca adanya Normalisasi, artinya pengaruh dari berkurangnya dana bantuan tersebut secara ekonomi akan berdampak pada melemahnya pembiayaan yang disalurkan melalui paket bantuan, berupa kebutuhan pokok, uang dan pembiayaan pembangunan di Palestina. Sebelum Normalisasi kekurangan bantuan dana internasional ini sudah dialami oleh Palestina ditambah pula oleh keadaan ketika Israel melarang Impor barang masuk ke Jalur Gaza yang dianggapnya bisa digunakan untuk keperluan militer. Hal ini masuk dalam Kategori (*ekopolitik*) yaitu (*the economopolitics*) keadaan kehidupan ekonomi.

2. Dampak Terhadap Israel

Dalam Normalisasi tersebut Israel berada pada posisi yang menginginkan adanya Normalisasi tersebut, sebab dalam setiap perundingan beberapa kali Israel merangkul AS untuk menjadi penengah atas masalahnya dengan palestina dan tetangga arab di sekitar kawasan, pasang surut perundingan yang pernah diadakan namun pada Normalisasi kali ini Israel nampaknya menuai hasil serta keuntungan dan manfaat, secara geopolitik Israel menuai keuntungan politik, keamanan dan ekonomi dari Normalisasi tersebut diantaranya adalah :

- **Keuntungan Politik dan Keamanan di Kawasan**

Walau sejak awal berdiri Israel sudah kuat menjadi sebuah negara, Namun adanya Normalisasi ini ditambah pula dorongan oleh amerika serikat selaku sekutu yang siap membela dan mendukung hak-hak Israel sebagai sebuah negara

ditambah pula oleh dorongan kecanggihan alutsista pertahanan yang menjadi salah satu kekuatan militer terbaik di Timur Tengah menjadikan Israel kuat maju lebih unggul di banding negara-negara Arab lainnya yang berdekatan.

Perkembangan politik Regional Timur Tengah tidak mungkin dapat dilihat terlepas dari perkembangan politik Global, jika melihat berbagai pandangan bahwa amerika menjadi tumpuan satu-satunya banyak pihak sebagai solusi pemecahan berbagai pertikaian konflik yang ada, maka hal demikian menunjukkan dalam realitas politik global memang hanya amerika sajalah yang patut memegang kartu-kartu kunci atas penyelesaian konflik Israel-Arab. Kenyataan seperti ini sesungguhnya mengisyaratkan secara diplomatis, politis, dan ideologis, Israel tetap menjadi salah satu prioritas yang paling *Favorable* untuk mencapai target dan tujuan perdamaian yang paling menguntungkannya. Hal ini dapat dipahami oleh karena sejak berdirinya Israel pada tahun 1948, Washington belum pernah menunjukkan gejala kurangnya komitmen untuk selalu memenangkan politik Israel di Timur Tengah. Malah dapat dikatakan, kepentingan Israel telah menjadi semacam bagian integral dari kepentingan nasional Amerika Serikat. Konflik yang terjadi di kawasan Timur Tengah adalah merupakan bagian dari pentas dunia. Israel dan Palestina adalah pemeran utamanya. Di sampingnya ada Mesir, Yordania, Libanon, Suriah, Libya, Irak, Iran, sebagai pemeran pembantu. (Hidayat, 2021)

Ditambah lagi Lobi Zionis terhadap pemerintahan amerika yang terdiri oleh organisasi zionis amerika (*The American Israel Public Affairs Committee (AIPAC)*) menjadi akar dasar yang memberikan dampak semakin kuatnya

eksistensi rezim pemerintahan Israel hingga saat ini. Dukungan atas setiap perundingan perdamaian yang dilakukan oleh AS untuk Israel dan negara-negara Arab memberikan keuntungan secara politik terhadap pemerintahan Israel agar semakin kuat dan diakui di kawasan.

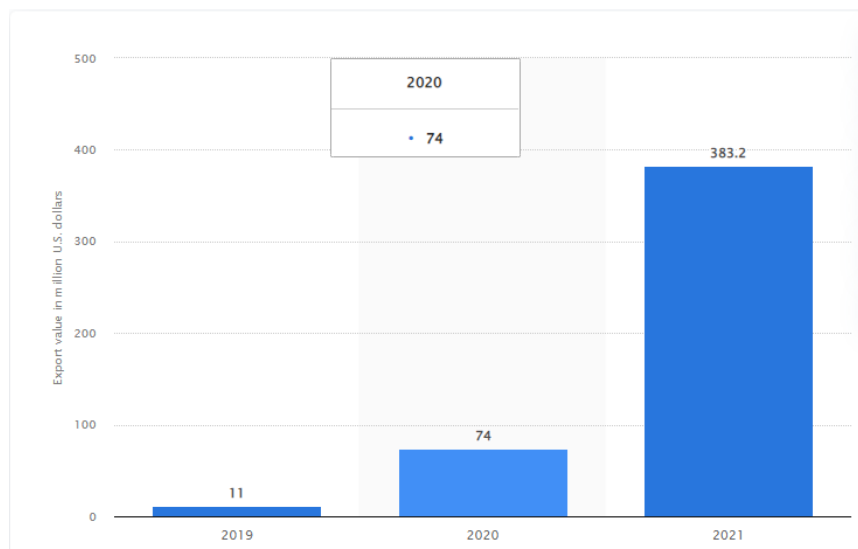
Faktor keamanan menjadi prioritas utama Israel melihat ancaman dari Iran yang kian berutil di kawasan serta ancaman secara langsung dari Iran terhadap Israel menjadi kan normalisasi ini sebagai kebijakan strategis untuk menekan pengaruh ancaman tersebut. Membangun aliansi dengan negara Arab teluk dengan mengajak Amerika untuk tetap melindungi dan memproteksi keamanan Regional di kawasan menambah berkurangnya kekhawatiran Israel dari ancaman luar. Penandatanganan Normalisasi itu juga bertujuan untuk menghadirkan pasukan Amerika di kawasan. (P. Aditya, 2020) Tidak hanya manfaat untuk UEA dan Bahrain, bagi Israel manfaat dari penempatan militer Amerika di kawasan menambah tingkat Proteksi keamanannya yang semakin Ultra.

Oleh karena itu semakin menguatnya pemerintah atau Rezim Israel ini masuk dalam Kategori (*das staatsregiment*) keadaan pemerintah atau *kratopolitics*. Sedangkan jaminan keamanan wilayah dari terciptanya normalisasi dengan negara-negara arab karena adanya potensi ancaman dari luar masuk dalam Kategori Negara (*Das Reich*) yaitu kermanan Wilayah (*Physiopolitik*).

- **Keuntungan Ekonomi**

Normalisasi tersebut membawa dampak dan manfaat yang besar terhadap perekonomian Israel jelas normalisasi tersebut melahirkan banyak kerja sama dan akan lebih banyak lagi rencana kerja sama ekonomi dimasa yang akan

datang. Baik dari UEA dan Bahrain sama-sama akan bertukar keuntungan dari kerja sama Ekonomi Sejak perjanjian Normalisasi, bank-bank Israel dan perusahaan lain telah menandatangani perjanjian kerja sama sambil membangun penerbangan langsung, menurut Menteri Luar Negeri Israel Gabi Ashkenazi, perjanjian tersebut akan memungkinkan peningkatan yang signifikan dalam investasi dan perdagangan, membantu satu sama lain mempromosikan ekonomi yang lebih mapan. Kemudian menteri Intelijen Israel Ali Cohen mengatakan bahwa nilai perdagangan tahunan antara Israel dan UEA diperkirakan akan mencapai 4 miliar dollar yang diperkirakan akan berkembang dalam 3 hingga 5 tahun kedepan, lanjutnya cohen mengatakan ada banyak hal yang akan diajarkan UEA kepada kita (Israel) dalam hal pembangunan dan infrastruktur serta digitalisasi kota, kami masih tertinggal inilah yang bisa mereka berikan kepada



kami. (Jennifer, 2020)

sumber : (Lichter, 2022)

Peningkatan dan perkembangan secara Ekonomi yang didapat oleh Israel dari perjanjian Normalisasi itu adalah meingkatnya nilai ekspor ke UEA pada tahun 2021 yang mencapai 382,2 juta dollar AS, itu merupakan peningkatan yang signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan ini dimulai pada 2020, menyusul penandatanganan "*Abraham Accords*", yang menormalkan hubungan ekonomi kedua negara. Secara hitungan Bahrain pun sama dan tidak jauh berbeda dengan UEA.

Keuntungan secara Ekonomi yang didapatkan oleh Israel setelah adanya Normalisasi Resmi ini akan menjadi jalan lebih B to B oleh para pengusaha Israel dengan pengusaha yang ada di UEA dan Bahrain. Oleh karen itu hal ini masuk dalam Kategori ekonomi negara (*Ekopolitics*).

B. Kepentingan Uni Emirat Arab, Bahrain dalam Normalisasi Hubungan dengan Israel dan kepentingan Internasional di Timur tengah

Mencapai kesepakatan Normalisasi tersebut merupakan tujuan bersama Uni Emirat Arab, Bahrain dan Israel karena dibalik itu akan mencapai sebuah kepentingan dan target. Bagi Uni Emirat Arab dan Bahrain kepentingan dan ambisi itu dapat diwujudkan jika berhasil merangkul AS dan Israel, keberhasilan itu akan mendatangkan keuntungan simbiosis mutualisme. Kerja sama Ekonomi, pertahanan, keamanan, teknologi bahkan mempertahankan kepentingan ideology politik sekalipun menjadi dasar terbentuknya kesepakatan tersebut.

1. Kepentingan pertahanan

Adanya pandangan yang sama oleh negara di kawasan Timur tengah seperti Arab Saudi, Uni emirat Arab, Bahrain termasuk Israel dan beberapa negara teluk lainnya dalam melihat ancaman keamanan regional. Hal itu ditunjukkan adanya serangkaian interaksi, konsolidasi keamanan interaregional beberapa decade ini, kerja sama yang dilakukan dan komunikasi yang intensif mengenai isu keamanan terus dilakukan dalam rangka mengupayakan survivalitas negara dari pihak dipersepsikan memberikan ancaman yaitu Iran.

Keberadaan Iran di Timur Tengah adalah sebagai superpower regional yang memiliki pengaruh yang luas. Jaringan operasi milisi yang masif menjadi ancaman bagi negara-negara yang bersebrangan secara ideologis maupun persepsi. Sebagai aktor, Iran memiliki kepentingan strategis dalam memperluas pengaruhnya di kawasan Timur Tengah. Beberapa upaya yang dilakukan sebagian besar pada peningkatan persenjataan secara kualitas dan kuantitas. Selain itu Iran kini tengah mendapat intensi dari dunia yaitu dugaan program pengembangan senjata nuklir oleh Iran. Terlepas dari dugaan belum terbukti, perilaku Iran untuk meningkatkan kemampuannya secara ofensif dan defensif bertujuan untuk mencapai kepentingan strategisnya dan menyeimbangkan dua pihak yang menjadi sumber ancaman bagi Iran yaitu Arab Saudi dan Israel. Akibat yang ditimbulkan Iran adalah munculnya security dilemma kepada negara-negara tetangganya.

Meski dalam hal ini Arab Saudi adalah negara yang terlibat langsung dalam Proxy war dengan Iran. Uni Emirat Arab, Bahrain dan Israel memberikan persepsi yang sama terhadap Iran sebagai sumber ancaman. Pada tulisan Emily Jones yang berjudul *WSJ: US Held Secret Meeting with Israel, Arab Military Leaders to*

Discuss Countering Iran. Memuat berita peretemuan Rahasia Di Mesir yang di hadiri oleh pemimpin dan pejabat militer Arab Saudi, Qatar, Yordania, Mesir dan khususnya adalah Uni Emirat Arab, Bahrain dan Israel Perilaku yang di lakukan oleh beberapa negara Arab termasuk Israel adalah tindakan pemenuhan suvivalitas negara dengan melakukan kerja sama.(Thoriq : 2022)

Hal yang sama juga dialami oleh Bahrain, Bahrain telah mencapai puncak hasil dari normalisasi tersebut hanya berselang satu tahun setelah penanda tangan (*Abraham accord*) di tahun 2020 lalu. Sehingga telah mencapai kesepakatan pertahanan penting. Selama bertahun-tahun belakangan telah jauh sebelum adanya normalisasi tersebut Bahrain dan Israel mempertahankan hubungan keamanan rahasia, yang berakar pada kekhawatiran mereka tentang Iran. Dalam pertemuan lanjutan menteri pertahanan Israel Beny Gantz mengatakan bahwa dengan latar belakang meningkatnya ancaman baik laut maupun udara, kerja sama semakin kami pererat dari sebelumnya. ini menunjukkan bahwa telah lama adanya kerja sama keamanan secara rahasia antara Bahrain dan Israel dan kembali kuat seiring semakin meningkatnya potensi ancaman di kawasan.(Aljazeera : 2022)

Faktor ancaman eksternal menjadi dominan dalam Normalisasi UEA dan Bahrain terhadap Israel, mengingat secara Geografi kedua negara Arab teluk tersebut paling rawan atas ancaman Iran. Perlu diketahui bahwa program Nuklir Iran telah menyebabkan persekutuan militer negara Arab dan Israel semakin kuat hingga saat ini. Amerika, sekutu baratnya dan Israel merupakan negara yang paling mewaspadaai program Nuklir ini, sehingga terjadilah pembatasan pengayaan

Uranium Nuklir Iran, oleh IAEA (*International Atom Energy Agreement*). Pada Juni 2015 Iran dan negara DK PBB ditambah Jerman mencapai kesepakatan yang tertuang dalam JCPOA (*Join Comprehensive Plan of Action*) yang berisi Pertama, Dalam pembatasan tersebut Iran diawasi hanya boleh melakukan pengayaan Uranium sebesar 20% dan dibatasi jumlah alat pengayaan Nuklirnya. Kedua, IAEA berhak menjadi pengontrol semua kegiatan Nuklir Iran termasuk diperbolehkan melakukan investigasi kapanpun. Ketiga, AS dan UE (*uni Europa*) akan mencabut sanksi tersebut apabila Iran mengikuti segala peraturan dan syarat yang sudah ditetapkan. (Mahdi, 2016). Adanya Program Nuklir tersebut dinilai akan menjadi sebuah ancaman bagi AS serta sekutu barat termasuk Uni Emirat Arab, Bahrain dan Israel yang berada dekat dengan Iran secara Geografis. Belum lagi adanya keterlibatan Iran di sejumlah konflik yang ada seperti di Syria, Lebanon, dan Yaman yang juga menjadi faktor ancaman dan stabilitas kawasan.

Adanya konflik serta ancaman tersebut AS (Amerika Serikat) dan sekutunya bahkan Rusia sekalipun memainkan peran penting terhadap Timur Tengah khususnya UEA dan Bahrain di wilayah ini, memang secara keseluruhan penjualan senjata di Timur Tengah mengalami peningkatan, sejak 2016 yang hanya sekitar 10% mengalami peningkatan pada 2020 menjadi 25%, .



Sumber : (Loesche, 2017)

Arab Saudi menjadi negara teratas import senjata Timur Tengah disusul UEA dan Bahrain Di tahun 2007 hingga 2016 Uni Emirat Arab Bahkan Bahrain masuk dalam Urutan terbesar Ekspor senjata AS di Timur Tengah



Sumber : (Essa, 2021)

Namun urutan tersebut menurun di tahun 2016 ke 2020 yang UEA hanya mengimport sebesar 3 persen pembeli persenjataan global tetapi walaupun mengalami penurunan UEA tetap menjadi importir senjata terbesar kesembilan di dunia, yang sebagian besar di jamin oleh AS, Prancis dan Rusia.

. Maka dari itu kepentingan pertahanan dan keamanan yang dimiliki oleh UEA dalam peristiwa normalisasi hubungan dengan Israel sangatlah penting

karena melihat besarnya perkembangan ancaman yang disebabkan oleh Iran dalam beberapa *tahun terakhir*. Artinya kepentingan Pertahanan AS dan sekutu sekutunya di Timur Tengah menjadi hal yang teramat penting.

Selain itu negara-negara Timur Tengah merupakan deretan negara konsumen terbesar persenjataan dunia negara-negara pengeksport senjata seperti Amerika Serikat, Rusia dan Prancis, Jerman. Dalam konteks normalisasi ini kepentingan pertahanan dan keamanan memiliki tingkat urgensi vital karena dengan melaksanakan kerjasama dengan Israel, UEA dan Bahrain kemudian mendapatkan bantuan dari AS dalam bidang militer terutama terkait penjualan senjata. Bantuan ini dipandang sebagai keuntungan bagi UEA dibanding negara Arab lainya karena seperti yang diketahui bahwa khususnya AS merupakan negara adidaya dengan kemampuan di bidang militer yang maju di dunia internasional yang memiliki kepentingan pertahanan untuk melakukan penjualan senjata ke Timur Tengah

2. Kepentingan Ekonomi

Dari sisi ekonomi Normalisasi yang terjalin antara Uni Emirat Arab, Bahrain dan Israel merupakan tujuan penting lainnya yang mereka inginkan. Momentum Normalisasi ini menjadi jalan besar bagi UEA untuk dapat memperkuat perdagangan dengan Israel. Perdagangan antara Israel dan negara-negara Teluk termasuk UEA diperkirakan mencapai \$ 1 miliar pertahun. Sebagian besar melalui anak perusahaan yang berbasis di Eropa dan di tempat lain. Perdagangan Bilateral UEA-Israel mendekati satu miliar dolar dengan sendirinya pada akhir tahun 2021, tidak termasuk pariwisata dan investasi, dan pejabat UEA mengatakan itu bisa

melebihi \$1 triliun selama decade berikutnya. Dari sisi teknologi Israel adalah negara yang paling menarik bagi negara-negara teluk khususnya UEA dan Bahrain teknologi Israel dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan pertanian, iklim dan kesehatan serta layanan keuangan. Tidak lama setelah kesepakatan tercapai UEA langsung menggelontorkan dana investasi \$ 10 miliar dibidang teknologi Israel. Kombinasi dana swasta dan negara UEA yang kemungkinan akan mencakup investasi di perusahaan rintisan teknologi Israel dan proyek-proyek besar lainnya. (Bauer, 2022)

Di sisi Bahrain mengutip sebuah tulisan dari zev stub yang berjudul "*Israel, Bahrain to sign economic cooperation agreement*" yang memuat publikasi tentang perjanjian kesepakatan kerja sama ekonomi Bahrain dan Israel, kesepakatan tersebut akan mendorong pergerakan bebas barang dan jasa. Selain itu tujuan dari kerja sama tersebut dimaksudkan akan mendorong sector swasta' bekerja sama dalam hal standarisasi dan regulasi, mendorong proyek-proyek R&B bersama, mengadakan seminar bisnis dan professional bersama serta bertukar keahlian pengetahuan di berbagai bidang. Perjanjian tersebut juga akan membentuk komite ekonomi bersama untuk mempromosikan pelaksanaan perjanjian dan memeriksa cara-cara untuk menghilangkan hambatan perdagangan dan meningkatkan volume perdagangan antar kedua negara. (Stub : 2021)

Dari sisi kepentingan ekonomi negara-negara Barat terhadap Timur Tengah yang dikomandoi oleh AS Menurut *Prof. Dr.Nur Syam, M.Si*, Dosen UIN Surabaya dalam (Uinsby.ac.id, n.d.) Memang kehendak Tuhan bahwa di bawah sebidang pasir yang sepi, ada kekayaan alam yang luar biasa, termasuk minyak

dan gas alam. Sumber daya alam ini memberi peluang bagi negara-negara Timur Tengah untuk mencapai tingkat kemakmuran yang cukup. Katakanlah, misalnya. Arab Saudi, Irak, Uni Emirat Arab, Bahrain, Kuwait, Qatar, dan negara-negara lain adalah contoh dari mereka yang warganya telah mendapat manfaat dari minyak.

Karena sumber daya alam yang begitu menjanjikan, negara-negara ini memiliki potensi untuk tumbuh menjadi negara yang sangat kuat. Sumber daya alam yang jumlahnya terbatas ini pada akhirnya akan habis jika tidak dikelola dengan baik. Sejak AS, Barat, dan sekutunya mendominasi sebagian besar perekonomian dunia, Timur Tengah menjadi sumber friksi ekonomi bagi negara-negara barat, khususnya AS. Selain itu, Israel digunakan oleh barat sebagai basis untuk mengontrol kekuat

3. Kepentingan Tatanan Dunia

Kepentingan Tatanan Dunia Menjadi salah satu Faktor dominan dalam Normalisasi Uni Emirat Arab, Bahrain dan Israel. Keinginan UEA dan Bahrain untuk dapat menghadirkan stabilitas di kawasan yang tidak mudah untuk di kendalikan hal inilah yang menyebabkan mereka bersekutu dan mengambil langkah demi kepentingan negaranya, apalagi pengaruh langsung dari iran menjadi ancaman tersendiri bagi Negara Arab Teluk itu. Turki yang secara langsung terlibat konflik di Iraq dan Suriah sedangkan iran memainkan peta pengaruh di suriah, Lebanon hingga Yaman. Adanya konflik dan proxy war di timur tengah menjadi langkah bagi UEA dan Bahrain agar menjadi Motor perdamaian di kawasan, Menteri Luar Negeri UEA Dr. Anwar Gargash

mengatakan dalam (Shariff, 2020) kami *memiliki rencana Ambisius untuk Perdamaian dan puncaknya kesepakatan ini akan membantu UEA menjadi ekonomi Arab dan Muslim yang sangat sukses*. Selain sebagai Motor perdamaian UEA tampaknya menginginkan sesuatu yang lebih agar tampil menjadi pemimpin perdamaian Arab-Israel sekaligus menjadi negara yang berada di barisan terdepan di Timur Tengah dalam mengambil keuntungan dari Normalisasi.

Selain itu, Keterlibatan negara barat seperti Inggris, Prancis yang di komandoi oleh Amerika Serikat di sejumlah wilayah Timur Tengah merupakan cara dan tujuan mereka untuk menciptakan tatanan Timur Tengah yang stabil, yang sesuai dengan keinginan politik luar negerinya. Jelas itu semua demi untuk melindungi kepentingan mereka dari berbagai potensi yang tidak sejalan dengannya. Contoh paling jelas adalah Tragedi 11 September 2001 menjadi alasan utama AS dan kawan-kawan baratnya terlibat di Timur Tengah untuk membasmi keberadaan Teorisme dan mengkampanyekan hak asasi manusia dari Rezim-Rezim dictator yang di pandang AS dan negara-negara barat sebagai Potensi ancaman kepentingannya seperti Iraq, Libya dan Afghanistan ketiga negara itu runtuh ketika tidak sejalan dengan kepentingannya di kawasan. Selain itu keinginan keras AS dan kawan-kawan baratnya untuk menguasai dan mendominasi Timur Tengah dengan tujuan menyingkirkan pengaruh kekuatan dunia seperti Rusia, yang pernah menginvasi Afghanistan dan terlibat dalam konflik di Syria. Pengaruh dan Hegemoni seperti inilah yang di inginkan Amerika dan sekutu baratnya demi menguasai dan memenuhi kepentingannya dari lawan

yang dianggap bersebrangan dengan tujuannya, demi menciptakan tatanan timur tengah yang stabil dalam kuasa dan pengaruh Hegemoninya.

4. Kepentingan Ideologis

Konflik Sunni dan Syiah turut memainkan peran dalam catur konflik persaingan pengaruh di Timur Tengah Secara Ideologi Uni Emirat arab beraliran mayoritas Islam Sunni baik penduduk maupun rezim yang sedang berkuasa sekarang, berbeda dengan Bahrain yang beraliran Islam Syiah berimbang dengan Sunni, Namun rezim yang sedang berkuasa di Bahrain saat ini di duduki oleh muslim Sunni Menurut Kepala Pengadilan Tinggi Agama Kerajaan Bahrain, *Dr Ibrahim Rasyid al-Muraikhi* dalam (Nasrullah, 2016) mengatakan Sunni dan Syiah di Bahrain memiliki toleransi yang kuat dan hidup berdampingan namun ada pengaruh yang datang dari luar yang kini menjadi ancaman, yang dapat memudarkan toleransi di Bahrain. Menurutnya ancaman yang dimaksud adalah dimensi propaganda yang datang dari Iran untuk mengembangkan agenda Revolusi dan perluasan ideologi Syiahnya. Dalam upaya menangkal pengaruh Iran yang beraliran Syiah membuat UEA Dan Bahrain tergabung dalam *Gulf Cooperation Council (GCC)* yang isinya terdiri dari monarki teluk Arab Sunni agar dapat bergerak bekerja sama untuk memperkuat aliansi.

Keterlibatan kekuatan luar sebutlah Dunia Barat atau lebih Eksplisit Amerika Serikat Menurut Daniel Byman and Sara Bjerg Moller mengatakan dalam (Bachtiar, 2021) Melindungi "Keamanan nasional" Israel adalah tujuan utama kepentingan ideologis Amerika di Timur Tengah. Mayoritas pengambil keputusan kebijakan luar negeri Amerika mendukung Israel. Bahkan dua partai

besar di kongres Amerika tampaknya telah memberikan suara bulat mendukung pendudukan Israel atas wilayah Palestina. Sebagian besar orang Yahudi Amerika adalah tokoh berpengaruh yang dapat mempengaruhi strategi politik. Fundamentalis Kristen (Evangelis) yang begitu bersikeras pada pembentukan negara Israel juga mendukung mereka.

Lobi Zionis sangat penting bagi mereka yang berkepentingan dengan pemilu. Dukungan yang paling dapat diandalkan dan sukses terutama disediakan oleh ini. Selain itu, karena militer Israel yang kuat dan reputasi mereka sebagai mitra ekonomi yang dapat diandalkan, dukungan untuk Israel tampaknya masih sangat bermanfaat, meskipun faktanya hal itu menumbuhkan sentimen anti-Amerika baru, khususnya di kalangan kelompok ekstremis Jihadis Muslim.

Selain Ideologi melindungi Israel ada sisi lain dari kepentingan Amerika di Timur Tengah yaitu ideologi yang dianut oleh AS dan barat adalah penyebaran nilai-nilai demokrasi yang berusaha di kampanyekan keseluruh dunia termasuk ke Timur Tengah. Tampaknya demokrasi ini tidak dapat melawan Rezim-rezim yang sedang berkuasa sekarang seperti di UEA dan Bahrain. Walaupun gelombang revolusi Arab spring melanda beberapa negara Arab namun tidak berpengaruh bagi negara Arab Teluk yang memiliki kedekatan akrab dengan AS dan negara barat. Namun contoh nyata dari pengaruh Ideologi demokrasi Amerika adalah peristiwa arab springs yang menuntut perubahan rezim yang berkuasa, Rezim rezim diktator ini dikenal adalah Rezim kejam yang memerintah atas kehendak kekuasaannya secara utuh menjalankan roda pemeritahan, terlebih lagi rezim diktator ini bertolak belakang dengan kepentingan barat, seperti Libya,

Iraq dan Afghanistan. Selain itu kepentingan dari sisi ideologis barat khususnya AS di Timur Tengah juga untuk membendung pengaruh Komunisme yang di komandoi oleh Uni Soviet (Rusia).

C. Respon Internasional dan Timur Tengah atas Normalisasi tersebut.

Negara Negara internasional termasuk lembaga internasional seperti PBB dan OKI memberikan respon dan tanggap terhadap normalisasi tersebut beragam bentuk Respon dan tanggap tersebut ada yang menentang adapula yang mendukung, sebagai berikut :

1. Pihak Yang Mendukung

Beragam respon yang dilontarkan oleh beberapa negara dalam menanggapi perjanjian Normalisasi tersebut' ada yang berupa protes, kecaman, pemboikotan dan bahkan sebaliknya mengapresiasi niat dan langkah baik tersebut yang mayoritas dari mereka mengatkan hal ini merupakan langkah baru untuk menciptakan perdamaian dan stabilitas kawasan, adapun dari mereka tak hanya condong kepada kepentingan perdamaian dan keamanan kawasan saja, Namun ada pula yang melihat dari aspek kemashlatan untuk palestina seperti berhentinya aneksasi di Tepi barat dan lainnya..

Negara yang mendukung dan menyambut baik adalah Mesir melalui presidenya, Abdul Fatah El-Sisi langsung memberikan ucapan apresiasi secara langsung melalui twitter nya El-Sisi mengatakan *“Saya menghargai upaya mereka yang bertanggung jawab atas kesepakatan itu untuk mencapai kemakmuran dan stabilitas kawasan kita”* (Wicaksono, 2020a, hal. 144)

Selanjutnya respon datang dari Yordania yang mengatakan

" Jika pengaturan tersebut berhasil membuat Israel menyetujui sebuah negara Palestina di wilayah yang telah didudukinya sejak Perang Arab-Israel 1967, hal itu dapat menyebabkan pembicaraan damai terhenti. "

"Ayman Safadi, menteri luar negeri Yordania, menyatakan dalam sebuah pernyataan yang disiarkan oleh media pemerintah bahwa jika Israel menggunakannya sebagai motivasi untuk mengakhiri pendudukan, itu akan mengarah pada perdamaian yang adil di kawasan itu. " (Idris, 2020)

Selain itu, kesepakatan itu dipuji oleh Perdana Menteri Inggris Boris Johnson, yang menyambutnya. "Saya benar-benar berharap pencaplokan Tepi Barat ditunda, dan keputusan hari ini untuk melakukannya adalah langkah positif menuju Timur Tengah yang lebih damai.. "(Hidayatullah, 2020)

Prancis melalui Presiden, Emanuel Macron dalam (Alfiyaturrohmaniyyah : 2021) mengapresiasi dengan mengatakan :

"Presiden Prancis Emmanuel Macron menyambut dengan baik pada hari Jumat 14 Agustus sebuah keputusan berani Uni Emirat Arab sehari setelah kesepakatan untuk menormalisasi hubungan antara negara ini dan Israel, yang dinegosiasikan oleh Amerika Serikat. (Saya) berharap perjanjian ini akan berkontribusi pada pembentukan perdamaian yang adil dan langgeng antara Israel dan Palestina," lanjut kepala negara Prancis dalam tweet, pesan ini kepada Presiden Trump, kepada Perdana Menteri Netanyahu dan Putra Mahkota Mohamed bin Zayed "

PBB menanggapi dengan mengungkapkan harapan bahwa normalisasi hubungan antara Israel dan Uni Emirat Arab dapat berkontribusi pada realisasi

solusi dua negara dengan Palestina. untuk terlibat kembali dalam negosiasi yang berarti yang akan menghasilkan solusi dua negara sesuai dengan resolusi PBB terkait, hukum internasional, dan perjanjian bilateral," kata juru bicara Guterres dalam sebuah pernyataan. Juru bicara tersebut menyatakan bahwa "Sekretaris jenderal akan terus bekerja dengan semua pihak untuk membuka jalan baru bagi dialog, perdamaian, dan stabilitas." (Hidayatullah, 2020)

Hampir mayoritas organisasi internasional mendukung upaya Normalisasi kedua Negara Arab Teluk ini dengan Israel. hal ini bukanlah sebuah kebetulan, melainkan sebuah dukungan yang akan semakin memperkuat eksistensi Negara Israel agar terus mendapat simpati internasional. Terbukti dengan normalisasinya UEA, Bahrain dengan Israel. menjadi jalan bagi Negara-negara di dunia khususnya negara Arab Teluk di Timur Tengah untuk menormalisasi hubungan dan melakukan banyak kerja sama, dan semakin mengesampingkan posisi Palestina di Timur tengah.

2. Pihak Yang Menentang

Dalam kesepakatan Normalisasi kedua negara Arab Teluk jelas mendapat banyak penolakan dan kecamana dari berbagai negara sebagian besar negara yang berada di Timur Tengah turut mengutuk dan menentang kesepakatan normalisasi tersebut, diantaranya ; Respon utama datang dari Otoritas palestina sendiri melalui perdana menteri Mohammad Syatteh yang mengatakan "*15 September sebagai hari hitam dalam sejarah dunia arab*".

Shtayyeh mendesak negara-negara arab untuk memboikot dan menolak perjanjian normalisasi tersebut, selain itu PA menuduh UEA, Bahrain melanggar

inisiatif perdamaian Arab 2002 yang berisi normalisasi Arab-Israel dapat dilakukan usai pembentukan negara Palestina dengan Yerusalem Timur sebagai Ibu kota nya.

Kemudian presiden palestina mahmoud abbas mengutuk perjanjian Normalisasi dengan bahrain setelah pengumuman pada jumat, menyebutnya sebagai *“Penghianatan terhadap masalah Palestina dan tidak akan ada perdamaian di Timur Tengah tanpa akhir dari pendudukan Israel”*. (Firmansyah, 2020)

Dari dalam negeri palestina Hamas dan Jihad islam palestina merespon kesepakatan normalisasi itu menurut Sami abu Zuhri juru bicara Hamas *“Perjanjian itu tidak akan membawa perdamaian ke Israel dan orang-orang di kawasan itu akan terus menganggap Israel sebagai musuh, dan kedua negara Arab itu sekarang sudah berpihak kepada musuh”*.(Aini : 2020)

Selanjutnya respon datang dari Turki, dengan memberikan kecaman pada Uni Emirat Arab dan Bahrain. Kementerian Luar Negeri Turki mengatakan, normalisasi itu akan memberikan pukulan baru bagi upaya untuk membela perjuangan Palestina..

“Hal itu akan mendorong Israel untuk melanjutkan praktik melanggar hukum terhadap Palestina dan juga upayanya untuk membuat pendudukan tanah Palestina menjadi permanen,” kata Kementerian Luar Negeri Turki.(Christiyaningsih : 2020)

Dari sisi bantuan secara kekuatan politik militer yang indikasinya menolak atau memprotes Normalisasi Uni Emirat Arab, Bahrain dengan Israel diantaranya

adalah Qatar, Qatar merespons dengan meningkatkan bantuannya sebesar 30 juta USD kepada penduduk Gaza dan mempromosikan Khaled Mashal sebagai pemimpin Hamas. Disisi lain, kemudian ada Turki yang mengambil tindakan untuk memperkuat kekuatan militer Hamas. Lalu, sejumlah partai politik dan kelompok Masyarakat sipil Aljazair mengutuk dan menyebut perjanjian ini sebagai “Pengkhiranatan” terhadap perjuangan Palestina. (Wicaksono : 2020 : 184)

Pemerintah Iran adalah yang paling menentang normalisasi diplomatic, Iran bereaksi keras terhadap normalisasi antara Uni Emirat Arab dan Israel. Menurut Menteri Luar Negeri Iran Mohammed Javad Zarif, UEA sekarang terlibat dalam "kejahatan Israel," dan itu merupakan ancaman bagi keamanan Islam regional dan global.

Ayatollah Ali Khamenei, pemimpin tertinggi Iran, mengecam UEA karena menandatangani perjanjian damai dengan Israel dan karena "Mengkhianati" Muslim. Presiden Iran Hasan Rouhani kemudian mengeluarkan peringatan, mengatakan bahwa Iran akan diperlakukan berbeda dari sebelumnya jika pakta itu dimaksudkan untuk meningkatkan wilayah Israel. Selain itu, Mayor Jenderal Mohammad Baqeri, Kepala Staf Umum Angkatan Bersenjata Iran, mengeluarkan peringatan bahwa Iran akan meminta pertanggungjawaban Uni Emirat Arab atas setiap peristiwa di Teluk Persia yang membahayakan keamanan nasionalnya, bahkan dengan cara yang paling kecil sekalipun. Iran tidak akan mentolerir peristiwa semacam itu. (Wicaksono, 2020a, hal. 145–146)

Penentangan sejumlah Negara yang berpenduduk mayoritas muslim dengan meningkatkan bantuan secara finansial dan dukungan politik merupakan

bentuk solidaritas mereka terhadap keberadaan Palestina, namun di satu sisi Karena adanya latar belakang agama yang sama. terbukti dengan adanya kebijakan Normalisasi kedua negara Arab terhadap Israel tersebut mendapat beragam kecaman serta dukungan terhadap Palestina.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pasca normalisasi kedua negara Arab Teluk Uni Emirat Arab dan Bahrain dengan Israel menghasilkan dampak secara langsung terhadap Palestina. **Menurunnya** bantuan dana ataupun tindakan politik yang diambil oleh otoritas Palestina secara langsung seperti penarikan kedutaan besar Palestina dari UEA dan Bahrain sebagai bentuk Respon atas tindakan kedua negara Arab Teluk tersebut, Yang memberikan kelonggaran pada Israel dalam urusan diplomasi dan kerja sama negara di kawasan. Berhentinya upaya aneksasi menjadi imbalan atas normalisasi tersebut yang memberikan angin segar bagi rakyat Palestina yang berada di bawah aneksasi Israel selama puluhan tahun, Namun hal tersebut masih menjadi pertanyaan apakah hanya bersifat sementara atautkah permanen. Di sisi lain kekuatan ekonomi Palestina yang hanya ditunjang oleh donasi berbagi negara mendapat pukula dari adanya normalisasi tersebut. turunnya angka anggaran bantuan dana dari UEA dan Bahrain, menjadi tantangan bagi Ekonomi palestina.

Bagi Israel Normalisasi tersebut adalah tujuan utama sebagai penguat kepentingan politik, ekonomi dan keamanannya di kawasan. Menilai adanya ancaman eksternal dan keinginan untuk mengkokohkan supremasi negaranya di kawasan menjadikan Normalisasi Diplomatik di bawah deklarasi *Abraham accords* ini sebagai rencana strategis Israel di

tahun 2020. Bergabungnya UEA dan Bahrain dalam kesepakatan *Abraham accord* memberikan keuntungan ekonomi dan aliansi pertahanan untuk mewujudkan stabilitas dan menangkis ancaman dari luar.

Selanjutnya, kepentingan Barat di Timur Tengah khususnya Amerika Serikat dan kepentingan UEA, Bahrain dalam Normalisasi tersebut terbagi menjadi kepentingan pertahanan, ekonomi, tatanan dunia, dan ideologis, yang dari empat pilar tersebut adalah dasar terwujudnya kepentingan Nasional negara mereka masing-masing. Kepentingan pertahanan dan ekonomi menjadi pilar Utama adanya Normalisasi Diplomatik tersebut di bawah deklarasi *Abraham accord*. Amerika Serikat selaku mediator dalam menciptakan perdamaian Di Timur Tengah turut mengambil kepentingan demi mewujudkan Timur Tengah yang Stabil berada di dalam pengaruhnya. Kendati itupun tujuan dasar dari adanya deklarasi *Abraham accord* hanya untuk menguatkan aliansi UEA, Bahrain dan Israel dari ketidakstabilan keamanan serta penguat kerja sama ekonomi. Hal tersebut mewakili keseluruhan dari kepentingan nasional negara mereka masing-masing. Meski dunia Internasional memberikan berbagai respon positif namun kecemasan juga jauh lebih keras atas adanya kesepakatan normalisasi tersebut.

B. Saran

Dalam penelitian ini penulis memberikan saran kepada civitas akademika selanjutnya sebagai penerus yang memiliki judul dan tema penelitian yang sama :

- D. Penulis menyarankan agar penelitian selanjutnya merujuk dan mengendapkan hasil dari penelitian yang memberikan solusi penyelesaian konflik antara Palestina dan Israel
- E. Penulis menyarankan pada para peneliti selanjutnya yang memang memiliki ketertarikan pada kajian konflik internasional, serta Politik Internasional agar kajian Palestina dan Israel menjadi pilihan, sebab konflik kedua negara sampai hari ini belum ada titik temu yang mengindikasikan perdamaian, hal ini nantinya akan memperbanyak temuan dalam literatur penelitian tersebut sehingga dapat memberikan informasi ilmiah atas polemik yang terjadi antara Palestina dan Israel serta negara-negara di Timur Tengah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

As-Suwaidan, D. T. (2017). Enslikopedi Palestina Bergambar (L. & M. A. Abu hudzaifah (ed.)). Zam-Zam mata air ilmu.

Bakry, D. U. S. (2017). Dasar-dasar hubungan internasional (1 ed.). PT Desindo Putra Mandiri.

Barston, R. P. (2014). Modern Diplomacy fourth edition. Routledge.

Riza, ahmad H. (1992). Palestina (solidaritas islam dan tata politik dunia baru). Pustaka Hidayah.

Sihbudi, R. (2007). Menyandera Timur Tengah: kebijakan AS dan Israel atas negara-negara muslim. PT Mizan Publika.

Sulisworo, D. W. (2012). Geopolitik Indonesia. In Universitas Ahmad Dahlan.
[http://eprints.uad.ac.id/9435/1/GOEPOLITIK INDONESIA Dwi.pdf](http://eprints.uad.ac.id/9435/1/GOEPOLITIK%20INDONESIA%20Dwi.pdf)

Syahmim. (2008). Hukum diplomatik dalam kerangka studi analisis. Rajawali Pers.

Gerges, F. E. (2002). Amerika dan Islam politik: benturan peradaban atau benturan kepentingan? In Pustaka Alvabet.

Aldino, A. P. (2017). Geopolitik: Teori dan Kajian. In universitas pertahanan (unhan press).

Dari Jurnal Ilmiah :

Anshary, M. A. (2021). PERAN AMERIKA SERIKAT TERHADAP NORMALISASI HUBUNGAN DIPLOMATIK ISRAEL DENGAN NEGARA-NEGARA TIMUR TENGAH. skripsi ilmu hubungan Internasional, 3(March), 6.

Azlan Abdul Rahman, Muhammad Farhan Zulkifli, & Rohaimi Rastam.(2018). Konflik Palestin dan Israel: Peperangan dan Diplomasi yang Tiada Penghujung? International Journal of Defence Management, Social Science & Humanities, 1(2), 82-92.

Burhanudin. (2006), gerakan zionisme yahudi dalam mendirikan negara israel. 1999(December), 1-6.

Al-asyura, M. K. Z. (2019). Pengaruh Hegemoni Amerika Serikat di Timur Tengah Terhadap Proses Rekonsiliasi Hamas dan Fatah 1. December 2019,12.

Kaslam, K. (2021). Review of International Relations 2021 DAMPAK ANEKSASI ISRAEL TERHADAP EKSISTENSI NEGARA PALESTINA (TINJAUAN GEOGRAFI POLITIK). *Review of International Relations 2021*, 3(2), 179-188.

CDeovanka, S. R., & Zulian, I. (2018). Analisis kepentingan nasional amerika serikat dan rusia dalam konflik suriah (2013-2018). *Jurnal Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Kependidikan*, 1(1), 23-33.

Fuhaidah, U. (2012). ANALISIS PELUANG KEDAULATAN NEGARA PALESTINA Ulya Fuhaidah. *Jurnal Review Politik*, 02(01), 115.

Uinsby.ac.id. (n.d.). kepentingan barat di timur tengah. uinsby.ac.id.
<http://nursyam.uinsby.ac.id/>

Firdaus, A. Y., & Yani, Y. M. (2021). Faktor Penghambat Perdamaian Konflik Palestina-Israel. *Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5(9), 109.

Nurjannah, E. P., & Fakhruddin, M. (2019). Deklarasi Balfour: Awal Mula Konflik Israel Palestina. *Jurnal Sejarah dan Pendidikan Sejarah*, 1(1), 15- 26.

Wicaksono, R. (2020b). Normalisasi Hubungan Uni Emirat Arab dengan Israel. *Jurnal ICMES*, 4(2), 171-194.

Wicaksono, R. (2020a). Analisis Kebijakan Uni Emirat Arab dalam Normalisasi Hubungannya dengan Israel. *Jurnal Middle East and Islamic Studies*, 7(2), 132-154.

Hakiki, F., & Sari, S. (2022). Kepentingan Nasional Arab Saudi dalam Kebijakan Intervensi Militer di Yaman terhadap Keterlibatan Iran. 1, 93-111.

Khumairoh, M. I., & Fadhil, A. (2019). Gerakan Intifadhah dan Kemunculan Hamas (1987-1993). *Jurnal Sejarah dan Pendidikan Sejarah*, 1(1), 1-14.

Alfiyaturrohmaniyyah, S. (2021). Pandangan Media di Indonesia dan di Prancis terhadap Berita Normalisasi Hubungan Israel dan Uni Emirat Arab dalam Studi Analisis Wacana Kritis.

Hidayat, W. (2021). Dampak Gerakan Zionisme Israel Terhadap Konstalasi di Timur Tengah. *Journal Social Society*, 1(2), 51-60.

Mahdi, I. (2016). Analisa kebijakan amerika serikat, cina, dan rusia dalam kesepakatan nuklir iran. *Jisiera: the Journal of Islamic Studies and International Relations*, 1(1), 75-89.

Manurung, M. (2021). Kepentingan Nasional Indonesia Dalam Kerjasama Pertahanan dan Keamanan Dengan Jepang Tahun 2015-2020. 1.

Muttaqien, M. (2015). Arab Spring: Dimensi Domestik, Regional dan Global. *Global Strategis*, 9(2), 262-276.

Misri A. Muchsin. (2015). Palestina dan Israel: Sejarah, Konflik dan Masa Depan. MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman, 39(2), 199.

Paat, V. E. (2013). Posisi Amerika Serikat Dalam Penyelesaian Konflik Palestina- Israel. Jurnal Politico, 2(1), 1-9.

Rozy, F. (2017). Journal of Diplomacy and International Studies. Journal of Diplomacy and International Studies, March.

Saputra, muhammad restu. (2021). ANALISIS KEPENTINGAN LUAR NEGERI AMERIKA SERIKAT PADA ABRAHAM ACCORD TERHADAP UPAYA PERDAMAIAN ISRAEL-PALESTINA. Departemen ilmu hubungan internasional, 1996, 6.

Thoriq, M. (2022). Analisis Ide Perilaku Beberapa Negara Timur Tengah untuk Membentuk Aliansi dalam Konsep Neorealisme Defensif. July.

Sukani, M. 1. (2020). Konsistensi Kebijakan Yordania Untuk Tetap Menawarkan "Solusi Dua Negara" Dalam Konflik Israel-Palestina. 15(2), 1-23.

Rahman, B. J. (2020). Hamas dan Fatah: Tekanan Ideologi dalam Membebaskan Palestina. Ampera: A Research Journal on Politics and Islamic Civilization, 1(2), 81-92.

Uinsby.ac.id. (n.d.). kepentingan barat di timur tengah. uinsby.ac.id.
<http://nursyam.uinsby.ac.id/>

Zada, K. (2015). Gelombang Revolusi Dan Transisi Politik Di Timur Tengah Dan Afrika Utara.

Dari Sumber Internet :

Aditya, I. (2020). Palestina Tarik Dubes. Krjogja.com.

Diakses dari <https://www.krjogja.com/peristiwa/internasional/palestina-tarik-dubes-dari-uni-emirat-arab/> pada tanggal 6 juni 2022

Aini, N. (2020). Hamas Kecam Kesepakatan UEA, Bahrain, dan Israel. Diakses dari Republika.co.id. Home > News > Internasional Hamas Kecam Kesepakatan UEA, Bahrain, dan Israel pada tanggal 9 juli 2022

Aljazeera.com. (2021). UAE drastically cut funding for Palestinian refugee agency. Aljazeera.com. di akses dari <https://www.aljazeera.com/news/2021/2/6/uae-drastically-cut-funding-for-palestinian-refugee-agency> pada tanggal 9 juli 2022

Aljazeera. (2022), Israel, Bahrain menandatangani perjanjian kerja sama keamanan di Manama. Al jazera, 1-12. <https://www.aljazeera.com/news/2022/2/3/israel-bahrain-sign-security-cooperation-agreement-in-manama> di akses 29 juli 2022

Area, akademik dan informasi universitas medan. (2022). Apa itu Geopolitik? Ini Pengertian. Teori, serta Unsur Pembangunan Geopolitik "selengkapnya Apa itu Geopolitik? Ini Pengertian, Teori, serta Unsur Pembangunan.

Bachtiar, H. (2021). Kepentingan Amerika di Timur Tengah. Di akses dari [Republika.co.id.https://www.republika.co.id/berita/r28xe834138514223000/](https://www.republika.co.id/berita/r28xe834138514223000/) kepentingan-amerika-di-timur-tengah pada tanggal 12 agustus 2022

Bauer, K. (2022). Kerjasama Ekonomi Israel-UEA Memiliki akar yang dalam dan dividen luas, HOOVER institution.di akses dari <https://www.hoover.org/research/israel-uae-economic-cooperation-has-deep-roots-and-broad-dividends> pada tanggal 17 juli 2022

CNNIndonesia.com. (2020). Israel Disebut Pasti Hentikan Aneksasi di Tanah Palestina. CNNIndonesia.com. diakses dari

<https://www.cnnindonesia.com/internasional/20200813230009-120-35534/israel-disebut-pasti-hentikan-aneksasi-di-tanah-palestina> pada tanggal 14 Juni 2022

Aditya, P. (2020). Normalisasi Israel dengan UEA dan Bahrain: Prognosis untuk kawasan.di akses dari [www.orfonline.or g. https://www.orfonline.org/expert-speak/israel-normalisation-uac-bahrain-prognosis-region/](https://www.orfonline.org/expert-speak/israel-normalisation-uac-bahrain-prognosis-region/) pada tanggal 19 agustus 2022

Fea. (2020). Israel-UEA-Bahrain Tanda Tangan Perjanjian Abraham Accords.CNN Indonesia. Di akses dari <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20200916023036-120-546973/israel-uca-bahrain-tanda-tangan-perjanjian-abraham-accords> pada tanggal 2 agustus 2022

Firmansyah, T. (2020). Zhuhur 11:59.Republika.co.id. di akses dari <https://republika.co.id/berita/qgp551377/palestina-normalisasi-dengan-israel-hari-kelambangsa-arab> pada tanggal 20 januari 2022

Cindyara, A. (2020). Rencana aneksasi Israel terhadap Palestina dan janji Netanyahu Di akses dari.<https://www.antaranews.com/berita/1633130/rencana-aneksasi-israel-terhadap-palestina-dan-janji-netanyahu#/mobile-nav> pada tanggal 8 juli 2022

Christiyaningsih. (2020). turki hingga iran kecam Normalisasi bahrain dan israel. [Republika.co.id.di akses dari https://www.republika.co.id/berita/qgihfd459/turki-hingga-iran-kecam-normalisasi-bahrainisrac](https://www.republika.co.id/berita/qgihfd459/turki-hingga-iran-kecam-normalisasi-bahrainisrac) pada tanggal 28 oktober 2022

Hidayatullah. (2020). Inilah Respon Dunia Terhadap Normalisasi Hubungan UEA dan Zionis. Hidayatullah.com. di akses dari [https://hidayatullah.com/berita/internasional/read/2020/08/14/190401/inilah-](https://hidayatullah.com/berita/internasional/read/2020/08/14/190401/inilah-respon-dunia-terhadap-normalisasi-hubungan-uea-dan-zionis-israel.html)

[respon-dunia-terhadap-normalisasi-hubungan-uea-dan-zionis-israel.html](https://hidayatullah.com/berita/internasional/read/2020/08/14/190401/inilah-respon-dunia-terhadap-normalisasi-hubungan-uea-dan-zionis-israel.html) pada tanggal 20 agustus 2022

Idris, M. (2020). Penasaran Seperti Apa Kondisi Ekonomi Palestina di akses dari [https://money.kompas.com/read/2020/07/27/120227526/penasaran-seperti-apa-kon](https://money.kompas.com/read/2020/07/27/120227526/penasaran-seperti-apa-kon-pada) pada tanggal 7 juli 2022

Essa, A. (2021). Penjualan senjata: AS tetap menjadi pemasok utama dunia saat belanja Timur Tengah melonjak Ekspor senjata AS meningkat dari 32 menjadi 37 persen selama lima tahun. [middleeasteye.net](https://www.middleeasteye.net). di akses dari <https://www.middleeasteye.net/news/middle-east-arms-sales-us-top-supplier> pada tanggal 14 agustus 2022

Sicca, S. P. (2020). Liga Arab Yakinkan Normalisasi UEA-Israel "Pasti" Hentikan Aneksasi Tepi Barat. [Kompas.com](https://www.kompas.com/global/read/2020/09/29/122131470/liga-arab-yakinkan-normalisasi-uea-israel-pasti-hentikan-aneksasi-tepi). di akses dari <https://www.kompas.com/global/read/2020/09/29/122131470/liga-arab-yakinkan-normalisasi-uea-israel-pasti-hentikan-aneksasi-tepi> pada tanggal 15 juli 2022

Jennifer, B. (2020). Kesepakatan Abraham: Setahun hubungan bisnis antara UEA, Israel, Bahrain, para ahli. diakses dari <https://english.alarabiya.net/News/middle-east/2021/08/13/Abraham-Accords-A-year-of-business-ties-between-UAE-Israel-Bahrain-experts> pada tanggal 19 agustus 2022

Hidayatullah. (2022). Mengenal Hamas dan Fatah, Dua Partai Berpengaruh Palestina. Diakses dari <https://hidayatullah.com/spesial/ragam/read/2021/05/29/209109/mengenal-hamas-dan-fatah-dua-partai-berpengaruh-palestina.html> pada tanggal 3 oktober 2022

Mahmud, E. (2020). terkait UEA-Israel. Di akses dari <https://padang.tribunnews.com/2020/08/15/terkait-uea-israel-normalisasi-hubungan-otoritas-palestina-tarik-duta-besar>? Pada tanggal 30 agustus 2022

Stub, Z. (2021). Israel, Bahrain akan menandatangani. [the jerusalem post](https://www.jpost.com/middle-east/israel-bahrain-to-sign-economic-cooperation-agreement-675033). akses dari <https://www.jpost.com/middle-east/israel-bahrain-to-sign-economic-cooperation-agreement-675033> pada tanggal 6 agustus 2022

Nasrullah, N. (2016). tokoh bahrain: jangan adu domba sunni syiah. Di akses dari <https://www.republika.co.id/berita/obmani320/tokoh-bahrain-jangan-adu-domba-sunni-syiah-part!> pada tanggal 12 oktober 2022

Permana, R. H. (2020). Kecam Perjanjian Israel, Palestina Tarik Dubes dari UEA. Di akses dari <https://news.detik.com/internasional/d-5133455/kecam-perjanjian-israel-palestina-tarik-dubes-dari-uea> pada tanggal 3 juni 2022

Shariff, O. (2020). Kami memiliki rencana ambisius untuk perdamaian: Dr. Anwar Gargash, Menteri Luar Negeri UEA memberi pengarahan kepada

media saat UEA, Bahrain menandatangani perjanjian damai dengan Israel di AS. Di akses dari <https://gulffnews.com/uae/government/we-have-ambitious-plans-for-peace-dr-anwar-gargash-une-minister-of-state-for-foreign-affairs-briefs-media-as-uac-bahrain-sign-peace-treaty-with-israel-in-the-us-1.1600168612822> pada tanggal 13 oktober 2022

Toi, S. (2021). UEA secara besar-besaran memotong bantuan ke Palestina setelah normalisasi dengan Israel. Di akses dari <https://www.timesofisrael.com/uae-massively-cut-aid-to-palestinians-after-normalization-with-israel/> pada tanggal 8 juni 2022

Lichter, E. (2022). Nilai ekspor dari Israel ke Uni Emirat Arab 2019-2021. *statisca.com*. Di akses dari <https://www.statista.com/statistics/1300810/value-of-perts-from-israel-to-the-united-arab-emirates/> pada tanggal 20 agustus 2022

Loesche, D. (2017). ARMS DEALS U.S. Arms Transfers to Rivaling Middle Eastern Allies, *statista.com* di akses dari. <https://www.statista.com/chart/9833/american-arms-exports-to-middle-eastern-countries/> pada tanggal 12 agustus 2022

Marriam-webster. (2022). pengertian diplomasi. In Dictionary. <https://www.merriam-webster.com/dictionary/diplomacy>. <https://www.merriam-webster.com/dictionary/diplomacy>

Prawiro, M. (2020). Pengertian Geopolitik: Tujuan, Fungsi, dan Geopolitik di Indonesia.

Dokumen Resmi :

US Departement of State. (2020). The Abraham Accords Declaration. Departement of State United States of Amerika, 1-3. Di akses dari <https://www.state.gov/the-abraham-accords>

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 : Dokumen Resmi Perjanjian Abraham Accords Normalisasi antara Israel Uni Emirat Arab dan Bahrain

The Abraham Accords Declaration:

We, the undersigned, recognize the importance of maintaining and strengthening peace in the Middle East and around the world based on mutual understanding and coexistence, as well as respect for human dignity and freedom, including religious freedom.

We encourage efforts to promote interfaith and intercultural dialogue to advance a culture of peace among the three Abrahamic religions and all humanity.

We believe that the best way to address challenges is through cooperation and dialogue and that developing friendly relations among States advances the interests of lasting peace in the Middle East and around the world.

We seek tolerance and respect for every person in order to make this world a place where all can enjoy a life of dignity and hope, no matter their race, faith or ethnicity.


We support science, art, medicine, and commerce to inspire humankind, maximize human potential and bring nations closer together.

We seek to end radicalization and conflict to provide all children a better future.

We pursue a vision of peace, security, and prosperity in the Middle East and around the world.

In this spirit, we warmly welcome and are encouraged by the progress already made in establishing diplomatic relations between Israel and its neighbors in the region under the principles of the Abraham Accords. We are encouraged by the ongoing efforts to consolidate and expand such friendly relations based on shared interests and a shared commitment to a better future.

Signed:



Sumber : <https://www.state.gov/wp-content/uploads/2020/10/Abraham-Accords-signed-FINAL-15-Sept-2020-508-1>.

LAMPIRAN 2 : Negara-Negara Arab yang Melakukan Normalisasi dengan Israel

NEGARA	TANGGAL NORMALISASI
Jordania	26 oktober 1994
Mesir	26 februari 1980
Uni emirat arab	15 september 2020
Bahrain	15 september 2020
Sudan	06 januari 2021
maroko	10 desember 2020

LAMPIRAN 3 : Penanda Tangan Normalisasi yang Di Tengahi oleh Amerika Serikat



Sumber : <https://news.republika.co.id/berita/qgqzi4412/normalisasi-israel-akankah-saudi-susul-uea-dan-bahrain>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
NOMOR : B. 1973 /Un.09/IV.3/PP.09/12/2021
Tentang PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI
DEKAN FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA UNIVERISTAS ISLAM NEGERI
RADEN FATAH PALEMBANG

- MENIMBANG :**
1. Bahwa untuk dapat menyusun skripsi yang baik, mahasiswa perlu dibimbing oleh tenaga ahli sebagai dosen pembimbing pertama dan pembimbing kedua yang bertanggung jawab untuk membimbing mahasiswa dalam rangka penyelesaian penyusunan Skripsi.
 2. Bahwa untuk kelancaran tugas-tugas pokok tersebut perlu dikeluarkan Surat Keputusan Dekan:
 3. Lembar persetujuan judul dan penunjukan Pembimbing Skripsi oleh Kepala Prodi Ilmu Politik Islam **AIDIL SAPUTRA**, tanggal, **28 Juli 2021**
- MENGINGAT :**
1. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 53 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Raden Fatah Palembang.
 2. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 407 tahun 2000;
 3. Instruksi Direktur Bimbaga Islam Departemen RI Nomor KEP/E/PP.00.9/147/1985 tanggal 5 Juni 1985 tentang pelaksanaan SKS dan Program S1 UIN Raden Fatah Palembang;
 4. Instruksi Menteri Agama RI No.B/152/1994 tentang Pelaksanaan SKS Program S1 UIN Raden Fatah Palembang;
 5. Pedoman Akademik UIN Raden Fatah Palembang No. LXXV tahun 2004;
 6. Kep.Menag RI No. 62 tahun 2015 tentang Statuta IAIN Raden Fatah Palembang;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN:
Pertama

: Menunjuk Saudara :

	N A M A	NIP
PEMBIMBING I	Dr. Andi Candra Jaya, M.Hum	197201192007011011
PEMBIMBING II	Kiki Mikail, M.A	198409212019031004

Dosen Fakultas Adab dan Humaniora UIN Raden Fatah Palembang masing-masing sebagai Pembimbing pertama dan Pembimbing kedua Skripsi Mahasiswa Fakultas Adab dan Humaniora atas nama Saudara :

N a m a : Aidil Saputra
N I M : 1810404017
Prodi : Politik Islam
Judul Skripsi : Konstelasi Politik Palestina Di Timur Tengah pasca Normalisasi Diplomatik UEA , Bahrain, dan Israel

Masa bimbingan : TMT. 06 Desember 2021 s/d 06 Juni 2022

- Kedua** : Kepada pembimbing pertama dan pembimbing kedua tersebut diberi hak sepenuhnya untuk merevisi Judul/kerangka Skripsi tersebut dengan sepengetahuan Fakultas.
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah/dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Palembang, 02 Desember 2021



Endang Rochmiatun

Tembusan :

1. Mahasiswa yang bersangkutan;
2. Dosen Penasehat Akademik yang bersangkutan;
3. Pembimbing Skripsi
4. Ka. Prodi Politik Islam
5. Arsip;

Kampus A : Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126
Telp. (0711) 352427
Website : www.adab.radenfatah.ac.id





KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADENFATAH PALEMBANG
FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA

Jl. Prof. K.H. ZainalAbidinFikri Km. 3,5 Palembang 30126Telp (0711) 353480 website:www.radenfatah.ac.id

HALAMAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Aidi saputra
NIM : 1820404022
Fakultas : Adab dan Humaniora
Jurusan : Politik Islam
Judul Skripsi : Konstelasi politik palestina ditimur tengah pasca Normalisasi Diplomatik UEA, Bahrian dan Israel
Pembimbing I : Dr. Andi Candra Jaya, M.Hum

No	Hari / Tanggal	Pembahasan	Saran	paraf
1	22 Feb -2022	Perbaiki BAB 1 - alur latar belakang - kerangka teoritis		/
2	9 - APRIL -2022	Perbaiki BAB 2		/
3	30, Juni, 2022	hal, Sumber, BUS 9		/
4	31 JULI	memperinci BAB 4		/
5	9 Oktober 2022	memperjelas kesimpulannya di BAB 5		/
6	7 Oktober 2022	ACC BAB 5 Full BUS		/



**LEMBAR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI
FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA UIN RADEN FATAH**

NAMA : AIDIL SAPUTRA
NIM : 182040402
PRODI : POLITE Islam
PEMBIMBING II : EKI MIEGIL, M.A
JUDUL SKRIPSI : Konstansi POLITE Palestina di timur tengah Pasca
Normalisasi diplomatik Uea, Bahrain dan ISBAE

NO	TANGGAL	PEMBAHASAN	CATATAN PEMBIMBING	PARAF
1	27 Jan 2022	BAB I	Penambahan teori geopolitik Penambahan teori kepentingan nasional - Perballan later belu	
2	7 mar 2022	BAB II	Perballan Penulisan	
3	8 Agustus 2022 10 Agustus 2022	BAB III BAB III	Penambahan materi dan sub judul, Perbaikan Penulisan Perubahan & penambahan sub judul	
4	24 Agustus 2022	BAB IV	- Perbaikan konteks menambahkan teori dengan hasil	
5	1 okt - 2022	BAB V dan keseluruhan BAB	ALL Seluruh BAB	

<https://adab.radenfatah.ac.id/>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA

BERITA ACARA SIDANG MUNAQASYAH
FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA UIN RADEN FATAH PALEMBANG

Pada hari ini Rabu 30 November 2022 / 6 Jumadil awal 1444 H pukul WIB Tim Penguji Munaqasyah mahasiswa Fakultas Adab dan Humaniora Raden Fatah Palembang telah mengadakan sidang Munaqasyah (ujianskripsi) mahasiswa:

Nama : Aidil Saputra
TTL : Palembang - 09 Januari - 2000
NIM : 1820404022
Judul Skripsi : **Konstelasi Politik Palestina di Timur Tengah Pasca Normalisasi Diplomati Uni Emirat Arab Bahrain dan Israel**

Dan memutuskan bahwa:

1. Setelah lulus seluruh mata kuliah dan mengikuti Ujian Munaqasyah, maka mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan LULUS/TIDAK LULUS Munaqasyah dengan nilai
2. Perbaikan dengan Team Penguji selambat-lambatnya 2 (dua) bulan terhitung mulai tanggal sejak ditetapkannya berita acara ini.
3. Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan belum diselesaikan perbaikan, maka mahasiswa yang bersangkutan diwajibkan untuk mengijuti Ujian Munaqasyah kembali.
4. Setelah mahasiswa ybs memenuhi persyaratan point 1, 2, 3, maka penjiilidan skripsi harus mengambil surat pengantar dari sub bag akademik untuk persyaratan mengikuti yudisium dan wisuda.
5. Apabila terdapat kekeliruan dalam berita acara ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

TEAM PENGUJI

JABATAN	NAMA/NIP	TANDA TANGAN
KETUA	Dr. Mohammad Syawaludin, M.Ag NIP. 197111242003121001	1.
SEKRETARIS	Yulion Zalpa, M.A NIP. 198807072019031011	2.
PENGUJI I	Dr. Mohammad Syawaludin, M.Ag NIP. 197111242003121001	3.
PENGUJI II	Yulion Zalpa, M.A NIP. 198807072019031011	4.
PEMBIMBING I	Dr. Andi Candra Jaya, M.Hum NIP. 197201192007011011	5.
PEMBIMBING II	Kiki Mikail M.A NIP. 198409212019031004	6.

Ketua,

Dr. Mohammad Syawaludin, M.Ag
NIP. 197111242003121001

Tembusan:
1. Kaprodi Politik Islam

Ditetapkan di : Palembang
Tanggal 30 - November - 2022
Sekretaris,

Yulion Zalpa, M.A
NIP. 198807072019031011

